IMPLEMENTASI KERJASAMA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dengan JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY pada SEKTOR **KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos. dalam Bidang **Hubungan Internasional**



Oleh:

RIJALIR ROHIM NIM.I72216074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL **JUNI 2021**

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Rijalir Rohim

NIM

: I72216074

Program Studi

: Hubungan Internasional

Judul Skripsi

: Implementasi Kerjasama Kementerian Pertanian (KEMENTAN)

Dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Pada Sektor

Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat kebuktian sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 Juni 2021 Yang menyatakan,



Rijalir Rohim NIM: 172216074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rijalir Rohim

NIM : I72216074

Program Studi: Hubungan Internasional

yang berjudul: "IMPLEMENTASI KERJASAMA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dengan *JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY* pada SEKTOR KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015-2019", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Sidoarjo, 29 Juni 2021

Pembimbing

Ridha Amaliyah, S.IP, MBA. NUP 201409001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rijalir Rohim yang berjudul: "Implementasi Kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency pada Sektor Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019", telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji pada tanggal 13 Juli 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Ridha Ameliyah, S.I.P. M.B.A. NUP 201409001 Penguji II

Muhammad Qobidl Ainul Arit, S.I.P., M.A.

NIP 198408232015031002

Penguji III

Penguji IV

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int, M.A.

NIP 1990032520180120

Zaky Ismail, M.S.I.

NIP 982123 02011011007

Surabaya, 13 Juli 2021 Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

<u>Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad. Dip. SEA, M. Phil, Ph.D.</u> NIP 197402091998031002

BLIKIND



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	lemika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Rijalir Rohim
NIM	: I72216074
Fakultas/Jurusan	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address	: rijalirrohim@gmail.com
UIN Sunan Ampel □ Skripsi □ yang berjudul : I	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () mplementasi Kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia ternational Cooperation Agency pada Sektor Ketahanan Pangan Tahun
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 23 November 2021.
	Penulis
	(Rijalir Rohim)

ABSTRACT

Rijalir Rohim, 2021, "Implementation of Cooperation Between the Ministry of Agriculture with Japan International Cooperation Agency in Food Security in 2015-2019", Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Implementation, Food Security, Bilateral Cooperation, Indonesia.

This study aims to examine the implementation of the Ministry of Agriculture and Japan International Cooperation Agency in 2015-2019 food security sector. As a country that has abundant natural resources and assistance from Japan, Indonesia continues to advance Food Security through Cooperation with Japan. The method is descriptive qualitative method in order to describe in detail the background to the operationalization of the implementation of cooperation in food security. In this study, the data collection technique is literature review through data reports, releases and official documents. The data analysis technique is triangulation. From the results of this study was found that the implementation of the Cooperation between Indonesia and Japan in food security was 1) Seed Assistance and infrastructure. 2) Farmer Loans and Insurance. 3) Promotion of Food Commodities.

ABSTRAK

Rijalir Rohim, 2021, "Implementasi Kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency* pada sektor Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019", Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: implementasi, ketahanan pangan, Kerjasama Bilateral, Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menkaji Implementasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency* pada sektor Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta bantuan dari negara Jepang, Indonesia terus berupaya untuk memajukan Ketahanan Pangan melalui kerjasama dengan Jepang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif guna menggambarkan secara rinci mengenai latar belakang hingga operasionalisasi Implementasi kerjasama dalam ketahanan pangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan kajian Pustaka melalui data laporan, rilis dan dokumen resmi. Teknik analisa data yang digunakan adalah triangulasi data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi dari kerjasama Indonesia dan Jepang dalam ketahanan pangan adalah 1) Bantuan benih dan sarana prasarana. 2) Pinjaman dan Asuransi Tani. 3) Promosi Komoditas Pangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN defined.	SKRIPSI. Error! Bookmark not
KATA PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR TABEL	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	
B. FOKUS PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
C. TUJUAN PENELIT <mark>IA</mark> N	8
D. MANFAAT PENE <mark>LITIAN</mark>	8
E. TINJAUAN PUST <mark>AK</mark> A	
F. ARGUMENTASI UTAMA	17
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	18
BAB II_KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Ketahanan Pangan	20
B. Kerjasama Internasional	
BAB III_METODE PENELITIAN	29
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu	30
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Anali	sis31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
F. Analisis Keabsahan Data	
BAB IV_PEMBAHASAN	34
A. Dinamika Ketahanan Pangan Indone	esia34
1. Era Orde Lama	36
2. Era Orde Baru	

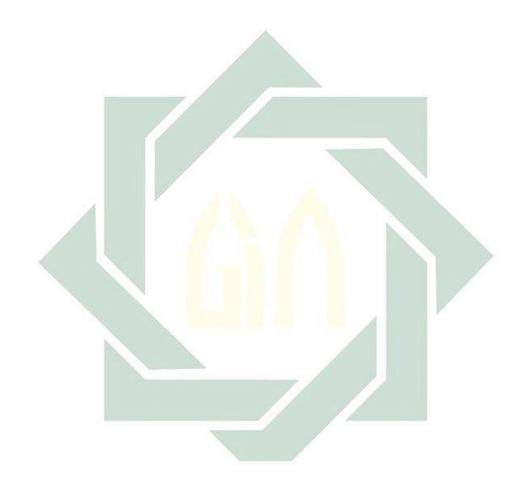
3. Era Reformasi	41
4. Era Presiden Joko Widodo	47
Produksi dalam Renstra Kementerian Pertanian	52
1. Meningkatkan Diverifikasi Pangan	52
2. Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas	53
3. Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Produk Hor Berdaya Asing	
4. Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Perkebunan	Kompetitif 55
5. Meningkatkan Kesejahteraan Petani	56
Indeks Ketahanan Pangan Indonesia	60
Pencapaian Kerjasama Jepang dan Indonesia	64
B. Implementasi Program Kerjasama Kementan dan JICA I Private Partnership Project for The Improvement of The Agric Marketing And Distribution System	ulture Product
1. BANTUAN BENIH <mark>DAN</mark> SARAN <mark>A P</mark> RODUKSI PER	TANIAN 74
2. PINJAMAN DAN <mark>AS</mark> URANSI <mark>PE</mark> TA <mark>NI</mark>	83
3. PROMOSI KOM <mark>OD</mark> ITAS PANGAN	
C. ANALISIS DATA	
BAB V_PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
OAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	. 3
Gambar 1.2	. 6
Gambar 4.1	. 63
Gambar 4.2	. 71
Gambar 4.3	. 81
Gambar 4.4	81
Gambar 4.5	86
Gambar 4.6	. 86
Gambar 4.7	87
Gambar 4.8	88
Gambar 4.9	88
Gambar 4.10	89

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	61
Tabel 4.2	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari total luas negara hingga mencapai 5.193.250 km² mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia mencakup sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km². Lautan Indonesia memiliki batas 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil.² Dengan luasnya wilayah Indonesia dari sektor perairan dan daratannya tersebut, maka tidak heran jika Indonesia dikatakan memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsanya. Dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia, pemerintah mengupayakan agar bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi ketahanan pangan nasional di dalam negara sendiri maupun internasional.³

Dengan luas dan sumber daya alam yang melimpah, setahun setelah merdeka Indonesia sempat membantu India memenuhi kebutuhan pangan dengan mengekspor setengah juta ton beras. Tapi di akhir tahun 1950-an, harga beras meroket karena produksi beras mengalami penurunan. Hal ini menjadikan

² "Letak Dan Luas Wilayah Indonesia", Kemdikbud, diakses 23 September 2020, https://sumberbelajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia-2017/menu4.html.

³ Ibid...

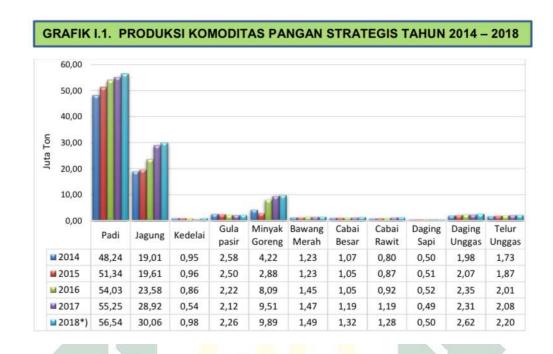
Indonesia sebagai negara impor nomor 1 di dunia pada akhir tahun 50-an dan memasuki tahun 60-an dengan nilai impor 800 ribu ton sampai 1 juta ton per tahun.⁴

Meskipun Indonesia pernah mengalami krisis pangan, indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami kemajuan di tahun 2014-2018 pada masa Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan data indeks ketahanan pangan Indonesia di produksi komuditas pangan strategis tahun 2014-2018 dan peningkatan indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan data *The Economist Intelligence Unit* (EIU), pada tahun 2014 mencapai 49,2 indeks dan di tahun 2018 mencapai 54,8 indeks.⁵ Data indeks tersebut memaparkan peningkatan produksi per tahun di beberapa komoditas pertanian pangan yakni: padi, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas dan telur unggas. Di data tersebut terlihat bahwa padi sangat dominan dalam menyongsong kemajuan pertanian Indonesia.

-

⁴ Mochtar Mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 17.

⁵ Meiardhy Mujianto, "Peta Ketahanan Kerentanan Pangan 2018", Jurnal Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pangan 2, no. 1 (2018): 15



Gambar 1.1 Tabel Produksi Komoditas Pangan Strategis Tahun 2014-2018 Sumber: Kementrian Pertanian RI

Upaya memajukan ketahanan pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai sejak Presiden RI pertama, Soekarno menyadari betul pentingnya ketahanan pangan bagi kemajuan bangsanya dan menganggap ketahanan pangan adalah sesuatu hal yang sangat strategis. Pandangan atau pemikiran dari presiden Soekarno masih berlanjut dan dianut oleh kepemimpinan Indonesia setelahnya. Dua puluh satu tahun kemudian, pada 11 Mei 1973, dalam salah satu acara kunjungan kerja di Yogyakarta, Presiden RI Soeharto mengemukakan bahwa Indonesia harus menghasilkan sendiri bahan-bahan pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita

⁶ Achmad Suryana, *Menelisik Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pengan, dan Swasembada Beras* (Bogor: Gramedia, 2018), 01.

telah ketahui agar kestabilan dari pada harga beras itu betul-betul akan terjamin.⁷ Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan umum masalah pangan pada dasarnya tetap sama persis dengan pandangan pemerintahan era sebelumnya. Namun kebijakan pangan presiden Susilo menekankan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian.⁸

Di era presiden Jokowi, beliau melontarkan visi dan misi sebelum memulai kebijakan-kebijakan untuk negara, salah satunya perihal kemajuan pangan Indonesia melalui "NAWACITA". Pada pemilihan presiden tahun 2014, presiden Jokowi menyebutkan bahwa beliau ingin membangun jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Presiden Jokowi menyebut kebijakan tersebut dengan kedaulatan pangan. Kebijakan yang dilontarkan tersebut menjadi kebijakan presiden Jokowi dalam mengupayakan ketahanan dan kemajuan ekonomi pangan Indonesia pada masa pemerintahan pertamanya.

Usaha ketahanan pangan dari masa presiden pertama hingga sekarang tidak terlepas dari berbagai kerjasama dengan negara lain ataupun organisasi internasional. Salah satu kerjasama Indonesia dalam hal ketahanan pangan adalah dengan pemerintah Jepang melalui bantuan dana serta program-program yang

_

⁷ M.H. Sawit, *Bulog: Pergulatan Dalam Pemantapan Peran dan Penyesuaian Kelembagaan* (Bogor: IPB Press, 2002), 12.

⁸ Kementrian Koordinator Bidang Per-ekonomian, *Revitalisai Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia* (Jakarta: Bidang perekonomian, 2005), 34.

⁹ Komisi Pemilihan Umum, Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian: Visi, Misi Dan Program Aksi Jokowi Dan Jusuf Kalla (Jakarta: pdf, 2014), 41

menyongsong ketahanan pangan yang diatur oleh *Japan International Cooperation Association* (JICA). Salah satu bantuan atau hibahan sukarela dari JICA yaitu hibahan mesin pengolahan makanan ke Dinas Prindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta pada 2014 serta Jawa Timur pada 2018. Tidak hanya itu, kerjasama antara JICA dan Kementrian Pertanian (KEMENTAN) merupakan realisasi dari kerjasama Indonesia dan Jepang dalam ketahanan pangan Indonesia.

Salah satu program kerjasama tersebut adalah *The Public Privat Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System.* Program ini sangat menarik dikarenakan kebijakan yang tidak berfokus pada pengembangan produksi padi dan beras saja seperti kebijakan di era Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan di era Presiden Joko Widodo ini menekankan pada bioindustri¹¹ dan kesejahteraan petani yang dikemas dengan kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indoenesia dengan *Japan International Cooperation Agency.* Hadirnya JICA di Indonesia bertujuan untuk membantu pembangunan negara berkembang dalam berbagai bidang, salah satunya ketahanan pangan Indonesia. Sejak tahun 1980an Indonesia termasuk dalam 10 negara penerima bantuan terbesar dan salah satu pemberi bantuan adalah Jepang melalui ODA dan juga JICA. ¹²

¹⁰ "Jepang Hibahkan Mesin Pengelolahan Makanan ke Jawa Timur", Antara, Diakses 02 Februari 2021, https://surabaya.bisnis.com/read/20180226/531/756051/jepang-hibahkan-mesin-pengolahan-makanan-ke-jawa-timur.

Sistem Pertanian Yang Memiliki Prinsip Memanfaatkan Secara Optimal Seluruh Sumberdaya Hayati Termasuk Biomassa dan Limbah Pertanian Bagi Kesejahteraan Masyarakat Secara Harmonis Dalam Suatu Ekosistem

¹² Armitage Nicole, From Crisis To Koyto And Beyond: The Evolution Of Environmental Concerns In Japanese Official Development Assistance (Nagoya University, 2010), 09.





◆ For more information please contact Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office

TEL: 62-21-5795-2112

FAX:62-21-5795-2116

E-mail: pr@jica.or.id

Jakarta, 23 Oktober 2017

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA : PROYEK KEMITRAAN PUBLIK - SWASTA UNTUK PERBAIKAN SISTEM PEMASARAN DAN DISTRIBUSI PRODUK PERTANIAN

Maret 2016 Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) memulai kerjasama teknis proyek 'Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi Produk Pertanian'.

Proyek kerjasama yang akan berlansung empat tahun ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah yang dipilih menjadi model. Proyek ini melakukan pengembangan dan validasi model produksi dan distribusi untuk menciptakan sistem pemasaran yang aman dan baik antara petani dan pasar modern. Di sisi lain, proyek ini juga diharapkan dapat memperkuat peran dan kapasitas para pemangku jabatan pemerintah untuk mempromosikan produk holtikultura dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien.

Daerah yang dijadikan model dalam proyek ini adalah Jakarta dan Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupatan Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) dan proyek ini akan berakhir pada Februari 2010.

Mulai (19/10/2017) sampai dengan (29/10/2017) para petani dari propinsi Jawa Barat yang terlibat dalam proyek ini akan berpartisipasi dalam acara "Farm to Table", sebuah pameran yang diorganisir oleh AEON BSD City Mall dan Kementerian Pertanian, bertempat di Main Atrium AEON MALL BSD CITY.

Di dalam kegiatan tersebut akan dipamerkan buah dan sayur nusantara, berbagai aneka buah langka, aneka buah dan sayur, aneka bunga dan tanaman, salad bar organik, pojok organik, dan pojok untuk belajar bercocok tanam, para petani yang terlibat dalam proyek JICA ini akan membawa dan menjual sayuran segar yang dihasilkannya.

Dengan adanya peningkatan keragaman dan preferensi makanan di Indonesia saat ini, konsumen mulai memprioritaskan bahan pangan yang segar dan aman. Dengan latar belakang inilah, maka dinilai penting untuk membangun sebuah rantai pasok produk industri pertanian yang efisien agar bagaimana para petani mendapatkan akses langsung bertransaksi dengan pasar modern. Harapan ke depan proyek ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan juga meningkatkan promosi untuk investasi di bidang agribisnis.

Gambar 1.2 rilis MoU Kerjasama Kementerian Pertanian (KEMENTAN) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Sumber: Japan International Cooperation Agency (JICA).

Japan International Cooperation Association (JICA) merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan kesepakatan resmi bilateral antar pemerintah. Sejak ikutnya Jepang dalam Colombo Plan pada tahun 1954,

pemerintah Jepang terus meningkatkan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan dana dan teknologi yang dimilikinya melalui kerangka Bantuan Pembangunan Resmi atau *Official Development Assistance* (ODA).¹³

Sebagai organisasi yang bertugas mengelola ODA, JICA bertugas untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi dan pembangunan infrastuktur di negara-negara penerima bantuan melalui kerjasama teknis, pinjaman dan hibah yang didasarkan pada kepentingan masing-masing negara. Dalam pelaksanaan tujuan dari JICA, beberapa misi yang menjadi fokus dari JICA untuk membantu negara berkembang adalah Infrastruktur ekonomi yang masih berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan, dan pemberdayaan SDM.

Peneliti mengambil unit analisis negara dengan fokus Indonesia sebagai subyek yang menjalani kerjasama tersebut. Batasan waktu penelitian pada tahun 2015-2019 diambil karena rencana kerjasama dimulai sejak tahun 2015 namun pelaksanaannya dimulai pada awal tahun 2016. Penelitian ini sangat penting untuk dibahas oleh peneliti dikarenakan belum adanya yang membahas mengenai implementasi dari kerjasama tersebut. Tidak hanya itu, ketertarikan peneliti untuk membahas dikarenakan perbedaan fokus kebijakan masa presiden Joko Widodo dengan kebijakan pemimpin sebelumnya.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitian ini adalah:

7

¹³ Iryani Tri Faridai, *Peranan Japan International Cooperation Agency (JICA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan 2007-2010)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8, no.2 (2011): 4.

¹⁴ JICA, *JICA di Indonesia* (Jakarta: IPB press, 2012,) 7.

- 1. Bagaimana dinamika ketahanan Pangan RI dari Orde Lama sampai saat ini?
- Bagaimana Implementasi Kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency pada Sektor Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi dari kerjasama Indonesia-Jepang melalui KEMENTAN-JICA tahun 2015-2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan manfaat di bidang akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih di bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam mengkaji kerjasama dan peran NGO, IGO maupun Negara lain dalam salah satu aktor Hubungan Internasional. Tidak hanya itu, peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi rujukan oleh peneliti lain dalam meneliti kerjasama maupun pengaruh JICA terhadap perkembangan pangan Indonesia maupun rujukan penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dari Langkah pengambilan kebijakan bagi pemerintah khususnya dalam ketahanan pangan

maupun perkembangan pangan Indonesia melalui kerjasama Indonesia-Jepang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu baik melalui jurnal, skripsi maupun buku yang menjadi bahan pembanding dan pelengkap yang akan digunakan peneliti sebagai data rujukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang akan menjadi bahan tinjauan pustaka:

1. Skripsi karya Suciyanti Tri Regiana mahasiswi program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UPN Veteran Jakarta dengan judul "Implementasi Program Kerjasama Indonesia Dan JICA (Japan International Cooperation Agency) Dalam Proyek Mecs (Mangrove Ecosystem Conservation And Sustainable Use) di Surabaya dan Balikpapan periode 2011-2013" pada tahun 2014. Suciyanti menuturkan bahwa JICA menjadi peranan yang penting bagi perkembangan Indonesia khususnya di bidang lingkungan. Menurut penelitiannya, JICA menjadi badan donor bilateral yang melaksanakan semua skema bantuan, yaitu kerjasama teknik, pinjaman bersyarat lunak atau pinjaman ODA dan bantuan hibah. Hal ini yang menjadi kesamaan penelitian dengan penulis yaitu menganalisa peranan JICA terhadap perkembangan Indonesia serta implementasi dari kerjasama. Tidak hanya itu, kesamaan penelitian juga

¹⁵ Suciyanti Tri Regiana, "Implementasi Program Kerjasama Indonesia dan JICA (Japan International Cooperation Agency) Dalam Proyek Mecs (Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use) di Surabaya dan Balikpapan Periode 2011-2013 (Skripsi, UPN Veteran, 2014).

- dilihat dari kajian teoritik yang sama yaitu kerjasama internasional. Namun yang menjadi perbedaan tentunya di objek yang akan diteliti.
- 2. Artikel yang ditulis oleh Yunastiti Purwaningsih dengan judul Ketahanan Pangan: Situasi, permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan masyarakat pada tahun 2008. 16 Dalam artikelnya, Yunastati menjelaskan bahwa ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah-masalah pangan yang dihadapi. Persamaan dari penelitian penulis adalah dalam hal meneliti secara umum pangan dari sektor pertanian. Yang menjadi perbedaan adalah yunastati hanya berfokus di strategi penyediaan pangan namun penulis akan meneliti realisasi dari strategi penyediaan pangan maupun perkembangan pangan.
- 3. Artikel dengan judul "Ketahanan Pangan Berbasis Produksi Dan Kesejahteraan Petani" yang ditulis oleh Dwijdono H.Darwanto pada tahun 2005. 17 Dwijdono menuturkan dalam artikelnya bahwa program ketahanan pangan belum bisa terlepas sepenuhnya dari beras sebagai komoditi basis yang strategis. Hal tersebut tersurat dalam rumusan pembangunan pertanian bahwa sasaran indikatif produksi komoditas utama tanaman pangan dan cadangan pangan pemerintah juga masih berbasis pada beras. Namun yang menjadi permasalahan ialah pemerintah hanya berfokus pada produksi beras tanpa mementingkan secara khusus tingkat kualitas beras, tingkat kualitas

¹⁶ Yunastiti Purwaningsih, "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9, No. 1 (2008), 1-27.

¹⁷ Dwijdono H.Darwanto, "Ketahanan Pangan Berbasis Produksi Dan Kesejahteraan" Jurnal Ilmu Pertanian, 12, No.02 (2005), 152-164.

beras juga didasarkan pada kemampuan petani serta kesejahteraan petani. Artikel yang ditulis memiliki persamaan dengan penulis yakni membahas pentingnya sektor pangan untuk perekonomian Indonesia. Dan yang menjadi perbedaan ialah penulis secara umum mengurutkan strategi di bidang yang menjadi faktor maju pangan Indonesia yaitu infrastruktur, pelatihan petani maupun industri dalam mutu pangan dan strategi produksi yang tidak berfokus pada beras.

Artikel yang ditulis oleh Henny Maryowani dan Ashari dengan judul 4. "Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan". 18 Henny dan Ashari dalam artikelnya menulis bahwa Agroforestry dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agroforesty utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki Tingginya laju pertumbuhan penduduk kebutuhan bahan pangan. mengindikasikan meningkatnya pangan yang harus tersedia. Pencapaian sasaran peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan pola intensifikasi melalui peningkatan teknologi budidaya dan ekstensifikasi yang antara lain dapat dilakukan melalui perluasan areal pertanian di lahan hutan dengan sistim agroforestry. Kementerian kehutanan merupakan salah satu sektor yang ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, yang antara

¹⁸ Mayrowani, Henny, dan Ashari, "Pengembangan Agroforestry Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan", Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29, no. 2 (2011), 83-98.

lain mendapat tugas menyediakan lahan hutan untuk pengembangan pangan seperti dalam bentuk tumpangsari atau agroforestri. Penelitian Henny tersebut dalam artikelnya memiliki kesamaan yakni membahas instrumen dari program yang berfokus pada ketahanan pangan, namun yang menjadi perbedaan yakni subyek dan objeknya. Peneliti menggunakan kementerian pertanian yang bekerjasama dengan JICA serta objek penelitian berfokus pada generalisasi kerjasama di bidang pertanian melalui sektor ketahanan pangan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fildza Malifa Setiabudi berjudul "Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang Ke Indonesia Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan". Dalam skripsi ini, peneliti menuturkan bahwa kerjasama Jepang dan Indonesia diawali dengan pemberian dana rampasan peran dan berbagai bantuan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan piagam ODA, Jepang berusaha untuk melakukan kerjasama melalui pemberian bantuan ekonomi terhadap Indonesia. Maraknya ancaman lingkungan hidup di Indonesia dan tata kelola yang belum memadai melatarbelakangi Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai lembaga bantuan luar negeri Jepang untuk melakukan berbagai kerjasama melalui proyek-proyek utamanya. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswi dan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu

¹⁹ Malifa, Fildza, dan Setiabudi: "*Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang Ke Indonesia Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan*" (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

Hubungan Internasional tersebut memiliki persamaan alasan adanya kerjasama yang dilatarbelakangi oleh masalah yang ada di Suatu negara, namun yang menjadi perbedaan adalah masalah yang melatarbelakangi kerjasama tersebut yaitu mereka membahas tata Kelola lingkungan sedangkan penulis sendiri membahas ketahanan pangan. Namun skripsi tersebut bisa menjadi refrensi penulis untuk melihat pembentukan program serta implementasi di bidang masing-masing.

6. Skripsi karya Nike Astria Sinaga mahasiswi Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan judul "Kerjasama Jepang-Indonesia Melalui Japan International Association Agaency (JICA) Di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014". 20 Nike menjelaskan dalam penelitiannya bahwa selain konflik dan kesiagaan militer, interaksi utama antar pemerintah dan antar bangsa sebenernya dari aspek ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir baik dalam hubungan antar pemerintah, antar bangsa, organisasi pemerintah, perusahaan, individu, maupun aktor-aktor non-pemerintah. Salah satu bentuk interaksi dalam dunia internasional yaitu pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang. Pemberian bantuan asing tersebut merupakan instrumen kebijakan luar negeri. Contoh bentuk kerjasama tersebut adalah pemberian bantuan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada beberapa negara berkembang termasuk

²⁰ Nike Astria Sinaga, "Kerjasama Jepang-Indonesia Melalui *Japan International Association Agaency* (JICA) Di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014", Jurnal Jom Fisip, 02, No. 01 (2015).

Indonesia. JICA hadir di Kabupaten Bengkalis untuk melakukan peninjauan dan riset kemudian disusul dengan perancangan pemberian bantuan JICA yaitu melalui program pelatihan penataan ekosistem lingkungan hidup di Jepang, dalam pelatihan tersebut juga diberikan pelatihan mengelola makanan dengan sarana yang dimiliki melalui kreatifitas sumber daya manusianya sendiri. Nike dalam penelitiannya mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu membahas realisasi kerjasama Jepang-Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) serta pengelolaan lingkungan untuk mendapatkan pangan dan mendorong sektor ketahanan pangan sedangkan yang berbeda dengan penulis yaitu objek realisasi kerjasama tersebut, penulis lebih condong ke ketahanan pangan di tahun 2015-2019.

7. Artikel yang ditulis oleh Edi Susilo dengan judul "Peran Koperasi Agribisnis Dalam Ketahanan Pangan Di Indonesia". ²¹ Ia menjelaskan bahwa Koperasi merupakan badan hukum yang paling sesuai untuk masyarakat pedesaan yang sebagian besarnya bergerak pada sektor pertanian dengan ciri kegotongroyongan masyarakat yang melekat. Maka berbicara ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran koperasi agribisnis atau Koperasi Unit Desa (KUD). Keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 1984 yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah bukti nyata kontribusi Koperasi. Selama lebih dari 30 tahun tahun KUD secara aktif telah dilibatkan tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk mendukung stok

²¹ Susilo, Edi, "Peran Koperasi Agribisnis Dalam Ketahanan Panga Di Indonesia", Jurnal Dinamika Ekonomi dan bisnis, 10, no. 1 (2013), 22.

beras nasional, tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan pemasarannya kepasaran umum (pasar bebas). Potensi Koperasi yang dalam hal ini KUD dalam kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam beberapa dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari ketersediaan sarana, maupun ketersediaan personil. Demikian juga sesungguhnya KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun keberhasilan KUD pada waktu itu belum lagi optimal. Perbedaan dari penelitian penulis yakni objeknya, penulis fokus pada ketahanan pangan secara umum dan tidak dispesifikasikan terhadap satu faktor saja.

Skripsi yang ditulis oleh Alfa Hirosi dengan judul "Peran APTERR (Asean Plus Three Emergency Rice Reserves) Dalam Penanganan Ketahanan Pangan Beras Di Indonesia Tahun 2005 – 2012"²². Ia menerangkan bahwa Kebutuhan pangan terpenting di Indonesia terdapat pada komoditas beras. Itu karena makanan pokok utama masyarakat Indonesia adalah nasi. Sehingga konsumsi beras lebih tinggi dibandingkan sumber pangan lainnya. Karena pentingnya beras bagi masyarakat Indonesia, penelitian ini menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan masalah yang serius dan membutuhkan kerjasama multilateral untuk menyelesaikannya. Organisasi internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) membentuk APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) yang berfungsi untuk menyediakan

-

8.

²²Alfa Hirosi, "Peran APTERR (Asean Plus Three Emergency Rice Reserves) Dalam Penanganan Ketahanan Pangan Beras Di Indonesia Tahun 2005 – 2012" (Skripsi ,UPN Veteran, 2020).

cadangan beras dalam keadaan darurat. APTERR sebagai kerangka regional untuk menangani masalah kerawanan pangan pascabencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mendeskripsikan dampak penanganan pangan beras di Indonesia oleh peran APTERR, serta pengumpulan data primer dan sekunder melalui analisis data.

9. Skripsi yang ditulis oleh Tria Nur Insani dengan judul "Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Impor Beras Bagi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional". 23 Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris, kendati demikian, Indonesia kini malah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri, terutama dalam hal beras. Terdapat dua faktor dalam kasus impor beras ini, yakni faktor internal seperti menurunnya produksi beras nasional, meningkatnya jumlah konsumsi yang tidak sebanding dengan produksi, serta beberapa perubahan kebijakan yang menganggu jalannya agrikultur khususnya produksi padi. Dan juga dipengaruhi faktor eksternal yakni masalah iklim yang menghambat pertanian. Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia mengenai beras ini adalah Thailand, yang merupakan salah satu negara eksportir beras terbesar di Asia Tenggara. Penelitian tersebut memiliki kesamaan di metode penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif namun peneliti menggunakan subyek Indonesia dan Jepang dalam sektor ketahanan pangan di tahun 2015-2019.

²³ Tria Nur Insani, "Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Impor Beras Bagi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017).

Artikel yang ditulis oleh Sannaru Samsi Hariadi dengan judul "Urgensi Pembangunan Pedesaan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional (Urgency Of Rural Development For Reaching National Food Security)".²⁴ ia menjelaskan bahwa Pembangunan pedesaan sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga pembangunan multisektoral. Pembangunan multisektoral yang sinergis antar subsektor akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan sektor industri rumah tangga di pedesaan, mendukung pertanian dan penyerapan tenaga kerja pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya cukup pangan untuk setiap rumah tangga, tetapi juga melembagakan kebiasaan konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat tidak harus makan nasi sebagai makanan utama seharihari, tetapi mereka dapat mengkonsumsi jenis makanan lain sebagai makanan utama, misalnya singkong, jagung, sagu, dll, yang dapat disediakan secara lokal. Dalam penelitian tersebut, penulis menyebutkan bahwa hanya 1 faktor yang menjadi indikator ketahanan pangan, namun peneliti memiliki perbedaan dengan mencari implementasi kerjasama di sektor ketahanan pangan dengan mencari indikator-indikator secara umum yang nantinya dianalisa oleh peneliti.

F. ARGUMENTASI UTAMA

10.

²⁴ Sannaru Samsi Hariadi, "Urgensi Pembangunan Pedesaan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional (Urgency Of Rural Development For Reaching National Food Security)", Jurnal Ilmu Pertanian, 4 no. 2 (2008), 31.

Dugaan peneliti dalam penelitian ini adalah adanya implementasi dari kerjasama Indonesia-Jepang melalui program ataupun bantuan dana dari ODA yang diatur JICA secara signifikan. Peneliti juga mengaca dari beberapa tinjauan Pustaka yang dilihat banyak yang hanya mengerucutkan arti ketahanan pangan dari satu atau beberapa sektor hingga menjadi indikator, peneliti menganggap bahwa ada indikator secara umum dari ketahanan pangan yang dapat ditemukan dari kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I. Pendahuluan ,Dalam Bab ini, peneliti akan membahas kondisi pangan serta latar belakang kerjasama *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan Indonesia. Setelah latar belakang, maka peneliti selanjutnya membahas rumusan masalah yang berfungsi membatasi point yang akan diteliti. Sub bab selanjutnya yakni menyebutkan tujuan penelitian yang akan dicapai peneliti. Dilanjutkan sub bab lainnya dengan membahas manfaat penelitian dan tinjauan Pustaka penelitian sebelumya. Untuk membantu peneliti menjawab permasalahan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan argumentasi. Setelah itu mencamtukan sistematika penulisan penelitian dari bab I sampai bab V.

BAB II. Kerangka Teori, Bab ini membahas definisi konseptual dan landasan konseptual yang menjelaskan teori maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti ialah Teknik deduktif yaitu dengan membahas landasan teori yang bersifat umum hingga akhirnya dikerucutkan ke poin-poin yang akan diteliti atau dibahas. Tidak hanya itu, peneliti

menggunakan beberapa teori yang membantu menentukan hipotesa serta membahas beberapa tinjauan Pustaka yang mempunyai korelasi dengan penelitian.

BAB III. Metode Penelitian Peneliti akan menjelasan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dari penelitian, data subjek dan objek penelitian, data serta sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV. Pembahasan, Bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapat dari proses pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Dari kedua data tersebut, peneliti memaparkan dengan berbagai bentuk antara lain: table, teks wawancara, gambar dan sebagainya. Peneliti menyajikan dengan sistematis dan rapi sesuai dengan urutan atau kerangka peneliti yang sudah dibuat yakni penyajian data pandangan pangan Indonesia, sejarah kerjasama JICA-Indonesia, ketahanan pangan Indonesia, implementasi kerjasama Indonesia-JICA.

BAB V. Penutup, Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari penelitian, kesimpulan berisikan poin-poin penting yang disusun secara sistematis dari bab 1 hingga bab 5 sampai menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Di bab ini juga terdapat saran peneliti untuk harapan bagi peneliti lain atau yang terkait agar dapat menjadikan penelitian ini menjadi masukan serta wawasan kedepan.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi semua orang terhadap pangan secara cukup, aman, dan bergizi pada setiap waktu untuk aktif, sehat, dan produktif. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masih bergantung pada perdagangan internasional. Pengertian ketahanan pangan menurut undang-undang yang tertuang dalam UU No. tahun 1996 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah ataupun mutu, mudah didapatkan oleh masyarakat, harga terjangkau²⁶. Sementara itu. Menurut organisasi pangan internasional, *Food Availability Organization* (FAO), ketahanan pangan lebih menekankan pada tercukupinya kebutuhan pangan di masyarakat yang bergizi dan bermutu. Kedaulatan pangan merupakan turunan dari teori ketahanan pangan itu sendiri, yakni dengan memanfaatkan hasil pangan negara sendiri.

Ketahanan pangan di tingkat nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan

²⁵ Ketut Sadra Swastika, "Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan", Jurnal Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 9, no.3 (2011), 14.

²⁶ Hanafie, *Perkembangan Ketahanan Pangan Indonesia* (Yogyakarta: LKTSP, 2011), 24.

berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.²⁷ Dari beberapa pengertian tersebut, kemampuan dalam menyediakan pangan diutamakan dari sumber dalam negeri, yaitu dari bahan pangan yang dihasilkan oleh petani dalam negeri. Sedangkan impor pangan dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri, yang diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan kepentingan para produsen pangan di dalam negeri, yang mayoritas skala kecil serta dengan tetap memperhatikan kebutuhan konsumen khususnya kelompok miskin.²⁸

Terdapat tiga indikator yang menjadi subsistem ketahanan pangan yaitu subsistem penyediaan pangan, Distribusi dan konsumsi dan yang ketiga adalah saling mempengaruhi secara kesinambungan. Menurut badan ketahanan pangan, terdapat empat aspek yang membentuk ketahanan pangan, yaitu:²⁹

- Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaannya lebih diutamakan dari produk domestik.
- 2. Akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan, baik berasal dari produksi sendiri maupun pembelian, barter, hadiah, pinjaman, serta bantuan atau dari kelimanya semua.

21

²⁷ Hermanto, "Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah Pusat Dan Daerah", makalah, Jakarta, (2008), 01.

²⁸ Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan yang Berbunyi, "Pemasukan Pangan Dilakukan Apabila Produksi Pangan Dalam Negeri dan Cadangan Pangan Tidak Mencukupi Konsumsi Dengan Tetap Memperhatikan Kepentingan Produksi Dalam Negeri."

²⁹ "Penguatan Ketersediaan Pangan", badan ketahanan pangan, diakses 21 Mei 2021, http://bkp.pertanian.go.id

 Penyerapan pangan, dilihat dari penggunaan akan pangan oleh anggota keluarga pada masyarakat.

Aspek-aspek ketahanan pangan adalah sebagai berikut:³⁰

- Pangan yang terorganisir dan memadai untuk menanggulangi kebutuhan dari pesatnya perkembangan penduduk yang terus meningkat.
- 2. Aspek untuk melengkapi permintaan dari kualitas dan keanekaragaman bakal pangan untuk engantisipasi perubahan prioritas konsumen yang cenderung memperhatikan perihal isu kesehatan dan kebugaran.
- 3. Aspek tentang cara maupun proses mendistribusikan bakal pangan secara berkesinambungan.
- 4. Aspek tercapaianya tersedianya bahan pangan yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Aspek tersebut sering kali disebut dengan terjangkaunya pangan (food accessibility).

Terdapat beberapa indikator ketahanan pangan nasional, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Indikator Ketersediaan (*Food Availability*). Ketersediaan pangan adalah suatu kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pangan pada jumlah yang cukup aman, bergizi dan sehat yang berasal dari produksi negara sendiri ataupun impor, maupun bantuan pangan sehingga dapat terpenuhinya jumlah kalori yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat.

³⁰, B Saragih, *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (Kumpulan Pemikiran)* (Bogor: Yayasan, 1998). 78.

³¹ Webb, Patrik dan Rogers, Beatrice, "Addressing The In Food Insecurity, Occasional" jurnal USAID Office Of Food For Peace ,4, no. 1, (2012).

- 2. Indikator Akses Pangan (Food Acces). Indikator akses pangan adalah semua individu atau rumah tangga dengan kemampuan sumber daya yang ia miliki untuk memperoleh pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperoleh dari produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan. Terdapat beberapa akses rumah tangga maupun individu dalam pangan yaitu:
 - a. Akses Ekonomi. Meliputi pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga.
 - b. Akses Fisik. Menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi)
 - c. Akses Sosial. Menyangkut tentang preferensi pangan.
- 3. Indikator Penyerapan pangan (Food Utilization). Penyerapan pangan adalah kebutuhan seseorang untuk hidup sehat dalam menggunakan pangan seperti kebutuhan akan energi, gizi, air dan kesehatan lingkungan, pengetahuan anggota rumah tangga pada sanitasi, ketersediaan air, fasilitas layanan kesehatan, penyuluhan gizi, dan tingkat Kesehatan balita sangat efektif dalam penyerapan pangan.
- 4. Status Gizi (*Nutritional Status*). Status Gizi adalah *outcome* yang berasal dari ketahanan yang memiliki definisi sebagai cerminan dari kualitas hidup seseorang baik atau buruk, status gizi dihitung berdasarkan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

B. Kerjasama Internasional

Kerjasama adalah strategi yang dipegang oleh dua atau lebih aktor untuk mendapatkan tujuan bersama. Namun dalam Kamus Oxford, kerjasama adalah

fakta melakukan sesuatu bersama atau bekerja bersama menuju tujuan bersama.³² Definisi itu memiliki pokok yang sama dengan buku "Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan" yang ditulis oleh Abdulsyani. Menurutnya, kerja sama adalah bentuk proses sosial yang ada kegiatan tertentu untuk mendapatkan tujuan bersama dengan membantu memahami satu sama lain.³³

Konsep kerjasama internasional menurut para ahli adalah:

- 1. **Dougherty dan Pflatzgraff (1997)**. Pengertian kerjasama internasional adalah hubungan antar Negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri.
- 2. **Holsti** (1987).³⁵ Definisi kerjasama internasional adalah kolaborasi yang dilakukan setiap Negara dalam melihat masalah nasional (negaranya) yang dinggap perlu adanya penangan baik, lantaran jika tidak dilakukan akan mengancam kesatuan dan persatuan.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lain, vaitu:³⁶

^{32&}quot;The definition of implementation", oxfod dictionary, diakses 15 Oktober 2020, https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/implementation?q=implementation.

³³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994),

³⁴ Dougherty, James. E. And Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey (Paperback)* (United States: Published by Pearson, 2000), 418.

³⁵ K.J Holsti, *Politik Internasional Study Analisis II* (Jakarta: Erlangg, 1980), 89.

³⁶ K.J Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (USA: Mishawaka, 1998), 362-363.

- a) Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- b) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakantindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral. Kerjasama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain:

a. Secara Fungsi

Kerjasama dibagi menjadi dua, yakni: 1). Kerjasama pertahanan-keamanan (*Collective Security*) yang berfokus pada keamanan zona teritorial maupun wilayah perbatasan. 2). Kerjasama fungsional (Functional Co-Operation), kerjasama ini biasanya berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

b. Secara Aktor

Kerjasama internasional dibagi dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional.³⁷

- i. Bilateral, kerjasama bilateral adalah jenis kerjasama yang Melibatkan dua pihak aktor atau dua negara. Kerjasama ini kebanyakan berfokus pada suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara.
- ii. Multilateral, kerjasama multilateral adalah jenis kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara atau beberapa negara. Kerjasama multilateral tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota. Salah satu kerjasama ini adalah PBB, OKI, World Bank.
- iii. Regional, kerjasama regional adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di Kawasan satu rumpun yang memiliki tujuan yang sama. Kerjasama tersebut mencakup bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Contoh dari kerjasama tersebut adalah ASEAN, MEE, APEC.

Dilihat dari bentuk kerjasama di atas, kerjasama antara Indonesia dan Jepang merupakan jenis kerjasama bilateral. Kerjasama JICA dan kementrian Pertanian Indonesia dikategorikan ke dalam kerjasama fungsional. Kerjasama tersebut memiliki tujuan masing-masing yang saling memenuhi kepentingan antara keduanya. Pengaruh dari kerjasama itu mampu menjadi penilaian keberhasilan implementasi dari kerjasama keduanya. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Bidang Ekonomi

_

³⁷ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional* (Bandung: Fisip UNPAD Press, 1983), 83.

³⁸ Jackson, Robert & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1999), 04.

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan, ataupun investasi.

2. Bidang Politik

Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang politik. Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Indonesia pun juga melakukan kerjasama di bidang politik dengan negara lain.

3. Bidang Militer

Militer merupakan bidang angkatan bersenjata. Dua negara banyak yang melakukan kerjasama di bidang ini. Selain untuk melengkapi alat persenjataan, juga untuk melatih tentara bersenjata. Untuk membentuk kekuatan militer, hendaknya suatu negara menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia.

4. Bidang Teknologi dan Transportasi

Bidang teknologi dan transportasi pun tidak luput dari tujuan diadakannya kerjasama bilateral. Sebagai contoh adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang yang kemudian membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang.

Tujuan Kerjasama Bilateral

Adapun beberapa tujuan dari kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya

- Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya
- 3. Untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara
- 4. Untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju
- 5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara lain (mempererat hubungan dengan negara lain)

Manfaat Kerjasama Bilateral

Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut:

- 1. Menambah keuntungan negara
- 2. mempererat hubungan antar negara.
- 3. Memasarkan produk dalam negeri
- 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Manfaat lain dari kerjasama bilateral adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan melakukan kerjasama bilateral, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.

- 5. Mudah mendapatkan pinjaman keuangan
- 6. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB III

METODE PENELITIAN

Hal yang penting dalam sebuah penelitian adalah sebuah metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk memahami suatu objek atau masalah penelitian dengan cara mengumpulkan data hingga menyusunnya menjadi bentuk klarifikasi penelitian serta menginterpretasikan data. Sehingga dengan adanya metode penelitian bisa tersusun secara baik dan sistematis dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari pengguanaan pendekatan kualitatif akan dihasilkan data deskriptif dalam bentuk data tersurat di dalam suatu tulisan atau diucapkan oleh orang dan perilaku yang dianalisa. 40 Data yang dikumpulkan penulis dapat berupa data dalam bentuk kalimat dan gambar, bisa diambil dari buku, jurnal, surat kabar, laporan, sosial media resmi dan lainlain. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan maksud yang bersifat umum terhadap fakta sosial dari perspektif partisipan. Metode ini lebih condong terhadap teori substantif bermula dari data. Metode ini lebih sering digunakan untuk menjawab suatu masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang didapatkan dari penggalian dokumen. Data yang diperoleh

³⁹ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

⁴⁰ Bogdan dan Biklen. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, *ed.* Moelong et al 2010), Hal 248.

penulis dalam penelitian ini berupa dalam bentuk naskah laporan, catatan lapangan, foto, video, dokumen resmi, rilis kerjasama dan dokumentasi resmi lainnya.⁴¹

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana bertujuan menguji prediksi atau prinsip suatu teori yang digunakan sampai mengelaborasikan suatu penjelasan yang detail dari suatu teori. Dengan menggunakan Analisa deskriptif ini, diharapkan penulis dapat menahami serta mengetahui bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Jepang melalui Kementerian Pertanian Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam ketahanan pangan tahun 2015-2019 Pendekatan deskriptif juga dapat membantu penulis untuk menganalisis masalah berdasarkan data yang ditemukan. Penelitian ini akan didukung dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen laporan program kerjasama serta rilis kerjasama antara Kementerian Pertanian Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

B. Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jarak jauh melalui sosial media untuk berkomunikasi dengan pihak data primer, Kementerian Pertanian Indonesia atau Intansi yang memiliki data penunjang peneliti. Sedangkan lokasi pengerjaan penelitian ini dilakukan di tempat-tempat dengan fasilitas yang mendukung peneliti, seperti perpustakaan, *cafe*, warung kopi dan tempat yang sekiranya mampu dikerjakan oleh peneliti. Penelitian ini dimulai dari April 2021 hingga Juni 2021.

⁴¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, Kementerian Pertanian Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menjadi subyek penelitian dalam menjawab rumusan masalah. Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara. Program-program yang dihasilkan dari kerjasama antara keduanya merupakan salah satu bentuk implementasi dari kerjasama di Jepang dan Indonesia dalam ketahanan pangan dan pihak yang menjalankan program kerjasama tersebut adalah instansi milik pemerintah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil laporan program kerjasama Kementerian Pertanian dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), rilis kerjasama serta web resmi Kementerian Pertanian. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur (riset literatur) yaitu dari beberapa jurnal, tesis, buku, laporan, surat kabar online, tabloid online dan situs web yang dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi ilmiah tentang ulasan literatur, diskusi teori, dan konsep yang relevan.⁴²

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data induksi, yaitu dengan mengumpulkan data tentang fenomena yang

31

⁴² Suryadi Bakry, Umar , *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 55.

diteliti, kemudian diurutkan, dikelompokkan dan dianalisis secara penuh yang kemudian memengaruhi proses pembentukan generalisasi sebagai hasil penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis data induksi, peneliti mencoba mencari program dan implementasinya dalam penelitian kerjasama Kementerian Pertanian dengan *Japan International Cooperation Agency* sesuai dengan data yang ada.

F. Analisis Keabsahan Data

Ada kemungkinan data yang penulis peroleh tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan tahapan analisa data yang sudah penulis paparkan, maka proses analisais keabsahan data dilakukan setelah penulis memperoleh data dan sebelum penulis mendalami atau menafsirkan data hingga menyajikannya. Salah satu cara dalam menganalisa keabsahan data adalah dengan cara triangulasi. Ide dasar dari triangulasi data adalah semakin banyak sumber data yang memuat dan dapat dikonfirmasi suatu fenomena, maka semakin abash peneliti dalam menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Triangulasi digunakan oleh peneliti untuk mereduksi kemungkinan bias data yang didapatkan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dari rilis, dokumen laporan, dan arsip tentang kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency* dalam ketahanan pangan dari *Website* Kementerian Pertanian

⁴³ Bogdan dan Biklen, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, ed. Moelong et al, 2010), 248.

⁴⁴ Bachtiar, *Menyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 34..

Indonesia, Badan Ketahanan Pangan Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Terdapat tiga bentuk triangulasi, sebagai berikut:⁴⁵

1. Triangulasi Teknik

Merupakan Teknik Pengujian kredibilitas data dengan Teknik pengumpulan data yang didapat dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2. Triangulasi Waktu

Situasi atau waktu di setiap penelitian, pengecekan melalui observasi, wawancara dan lain-lain memiliki perbedaan, keabsahan data bisa dilakukan secara berulang sampai benar-benar menemukan kevalidan data. Dimana peneliti melakukan observasi data secara daring melalui *website*, jurnal, rilis, dokumen dan arsip, dan lainnya.

3. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas dan validitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumber dari rilis, dokumen laporan, dan arsip mengenai kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency*.

-

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: *Elfabeta*, 2007), 273.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dinamika Ketahanan Pangan Indonesia

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan bagi semua manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu, setiap negara tentunya memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatur sistem pangan. Di Indonesia, kebijakan pangan sudah tertulis rapi dan jelas dalam UU. No. 7 Tahun 1996 yang menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan termasuk dalam hak asasi manusia. ketahanan pangan sudah tertuang rapi di dalam aturan atau petunjuk pelaksaaan suatu hukum maupun kebijakan pemerintah republik Indonesia No. 68 Tahun 2002. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan pembangunan negara dalam menciptakan bangsa yang inovatif, mandiri, memiliki kredibilitas tinggi, dan sejahtera dari adanya bahan pangan yang cukup, terjamin, bergizi, dan ketercukupan serta mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ketahanan pangan di Indonesia sebenarnya terlihat dari pemerintahan awal setelah Indonesia merdeka hingga masa kini.

Pada Orde Lama, kebijakan pangan lebih difokuskan ke swasembada beras.

Terdapat dua kebijakan besar dalam mendukung fokus tersebut, yakni program kesejahteraan kasimo dan program sentra padi. Program peingkatan kemakmuran dan kasimo yang sejahtera didukung dengan adanya Yayasan yang memiliki fungsi

⁴⁶ Ahmad Erani Yustika, "Masalah Ketahanan Pangan", (Kompas, Opini, Rabu, 16 Januari, 2008), 6.

di bahan makanan (BAMA) pada tahun 1950-1952 serta Yayasan urusan bahan makanan (YUBM) pada tahun 1953-1956. Sedangkan program sentra padi didukung dengan adanya Yayasan badan pembelian padi (YBPP) pada tahun 1956 dan program substitusi jagung tahun 1963 serta pembentukan bimas dan panca usaha tani.⁴⁷

Kebijakan pangan dari Orde Lama ke Orde Baru dari tahun 1965-1967 kebijakan pemerintah meliputi antara lain pembentukan Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) sampai akhirnya pembelian beras digantikan dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai satu-satunya pembeli beras tunggal di Indonesia. Dari Orde Lama sampai baru saat masa-masa dilakukannya kebijakan pangan, fokus operasional pangan lebih fokus terhadap pangan pokok beras. Di masa itu, terlaksana juga hubungan di berbagai sektor pangan. BUMN benih merupakan titik awal pelaksanaan usaha pengadaan, perakitan dan Distribusi benih unggul bekerjasama dengan IRRI (*International Rice Research Institute*), saat itu, pangan sering dikaitkan dengan beras karena jenis pangan itu merupakan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. 48

Kebijakan pangan selama Orde Baru dapat dikelompokkan menjadi tiga periode sesuai perhatian Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yang pertama yakni swasembada beras (1969-1979), swasembada pangan (1979-1989) dan kembali lagi ke swasembada beras pada tahun 1989-1998. Pada swasembada

⁴⁷ "Ketahanan Pangan: Sejarah, Perkembangan Konsep Dan Ukuran", Kendar Umi Kulsum, diakses 23 Mei 2021, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ketahanan-pangan-sejarah-perkembangan-konsep-dan-ukuran

⁴⁸ Simatupang, dkk, "Indonesian Rice Production: Polices And Realities", Jurnal Indonesian Economic Studies, 1, no. 2 (2008): 65-78.

beras awal, terdapat beberapa program kegiatan, antara lain menambah tugas Bulog sebagai manajemen stok penyangga pangan nasional (1969), pengimpor gula dan gandum (1971), pengadaan daging untuk DKI Jakarta (1974), serta penetapan harga harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau (1978). Di kebijakan swasembada pangan (1979-1989), program diantaranya yakni mengembalikan tugas Bulog sebagai pengontrol harga gabah, beras, tepung, gandum dengan keputusan presiden 39 Tahun 1978. Pada kebijakan ini Indonesia mendapatkan medali dari FAO karena keberhasilan swasembada beras. Pada tahun 1989-1998 kebijakan ketahanan pangan Indonesia kembali lagi ke kebijakan swasembada beras namun di kebijakan ini, bulog diganti fungsinya hanya sebagai pengontrol harga beras saja. Dari Orde Lama sampai Reformasi, Indonesia memiliki perkembangan kebijakan pangan di setiap pemimpinnya.

1. Era Orde Lama

Pada era Soekarno, ia melantangkan bahwa pertanian adalah cikal bakal kesuksesan bangsa. Dalam pidatonya di IPB, ia menegaskan bahwa pangan itu hidup matinya suatu bangsa dan petani adalah tulang punggung pangan Indonesia. Soekarno memulai kebijakan ketahanan pangan dengan menata struktur lahan pertanian. Selama periode transisi 1945-1960, politik agraria Indonesia masih menggunakan hukum belanda namun Sebagian tata

_

⁴⁹ "Ketahanan Pangan: Sejarah, Perkembangan Konsep Dan Ukuran", Kendar Umi Kulsum, Diakses 23 Mei 2021, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ketahanan-pangan-sejarah-perkembangan-konsep-dan-ukuran

pengelolahan tanah pertanian dan perkebunan condong memakai cara Jepang.⁵⁰

Presiden Soekarno mengklasifikasikan jagung sebagai bahan pangan sekunder pengganti beras, dan pada tahun 1964 ia menerapkan panca usaha tani. Hal tersebut disesuaikan dengan kultur cara bercocok tanam petani Indonesia yang lebih sering menggabungkan atau memvariasikan tanaman padi dan jagung. Institusi yang berfokus pada bidang pertanian maupun yang berhubungan dengan sektor pertanian lebih ditunjang oleh instansi pusat dengan kebijakan yang meniru pemerintah hindia belanda. Namun perbedaannya kebijakan Soekarno lebih ke orientasi kepentingan dalam negeri yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lalu orientasi untuk ekspor.⁵¹

2. Era Orde Baru

Setelah masuk pada masa Orde Baru, sektor pertanian masih menjadi prioritas utama kerja kabinet untuk mempertahankan ketahanan pangan negara. Hal itu didukung dengan adanya kebijakan pembangunan yang berkonsentrasi dalam orientasi penguatan asas pertanian dimulai dari tahun 1969-1979 selama dua periode. Kebijakan tersebut adalah PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Di tahun masa periode pengorientasian penguatan asas pertanian, pemerintah juga mengeluarkan Kebijakan lainnya

⁵⁰ Nugraha Dewa, "Kebijakan Pembangunan Pertanian Era Soekarno" (Skripsi., Universitas Gadjah Mada, 2013).

^{51 &}quot;Sejarah Kebijakan Pangan Di Indonesia: Tinjauan", Leo Kusuma, diakses 20 Mei 2021, http://leo4kusuma.blogspot.com/2013/03/sejarah-kebijakan-pangan-di-indonesia.html#.YLOJzy9gllA

di tahun 1974, yakni *green revolution* (revolusi hijau) dengan tujuan untuk mendukung tercapainya swasembada beras, sedangkan pada tahun 1971 bulog mendapatkan tugas baru yakni sebagai pengimpor gula dan gandum. Ekspor migas menembus tingkatan harga tertinggi pada pertengahan dekade 1970-an dan menjadi pendukung kebijakan Impor pertanian dengan skala besar.⁵²

Program revolusi hijau pada tahun 1974 merupakan bentuk ambisi presiden Soeharto yang bersikukuh mewujudkan percepatan swasembada beras yang tidak pernah dicapai sejak kemerdekaan Indonesia. Gerakan revolusi hijau sendiri memiliki 4 pilar penting yaitu: 1.Penyediaan air melalui sistem irigasi, 2.Pemakaian pupuk kimia secara optimal, 3.Penerapan pestisida yang disesuaikan dengan tingkat serangan organisme atau hama perusak, 4.Penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas.⁵³ Namun program yang menghabiskan dana besar itu hanya menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984, 1985 dan 1986.⁵⁴ Setelahnya, Indonesia Kembali menjadi pengimpor beras dan bahkan menjadi aktor terbesar dalam impor beras di Asia tenggara. Program dari revolusi hijau tersebut lebih memberikan keuntungan terhadap petani kaya atau petani yang memiliki

_

⁵² Ibid

⁵³ "Pertanian Modern:Revolusi Hijau", HIMATETA IPB, diakses 20 Mei 2021, https://himateta.lk.ipb.ac.id/2010/07/pertanian-modern-revolusi-hijau/

⁵⁴ Laporan Statistic Pertanian dari BPS.

lahan sendiri dengan kriteria luasnya lahan yang dimiliki adalah sebesar lebih dari 1 hektar.⁵⁵

Dalam rangka guna mendukung kebijakan pertanian pangan, Soeharto menciptakan kebijakan infrastruktur pendukung yang cukup *significant*. Kebijakan tersebut direalisasikan kedalam bentuk pembangunan irigasi, pendirian pabrik pembuatan pupuk urea, dan pembangunan pusat-pusat penelitian tanaman pangan. Namun, meskipun sudah cukup banyak fasilitas pendukung kemajuan pangan, arah kebijakan tersebut lebih condong terhadap produksi tanaman beras. Padi maupun beras dikenalkan ke berbagai tempat atau wilayah yang sekiranya dianggap mumpuni untuk menjadi tempat pusat penanaman tanaman padi seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ternate, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan bahkan sampai ke Papua. Program transmigrasi pun digerakkan ke luar Jawa seluasluasnya guna mendukung perluasan lahan tanaman padi. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan produksi beras di dalam negeri lebih meningkat dan maju. Oleh karena itu, di era Soeharto sering disebut sebagai rezim beras karena Soeharto lebih mengartikan pangan adalah beras.⁵⁶

Beras yang menjadi impor komoditi pangan utama sebenarnya sudah diimplementasikan sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun bedanya kegiatan komoditi pada kepemimpinan Soekarno lebih condong ke peran bulog. Sedangkan di masa Soeharto, kegiatan komoditi diberikan

⁵⁵ "Masalah Kemerdekaan Pangan, dari Era Soekarno Hingga Joko Widodo", Ahmad Arif, diakses 20 Mei 2021, https://alif.id/read/bandung-mawardi/masalah-kemerdekaan-pangan-dari-era-soekarno-hingga-joko-widodo-b232046p/

⁵⁶ Ahmad Arif, Sagu Papua Untuk Dunia (Jakarta: Gramedia, 2019), 16.

kepada pihak swasta sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun beberapa jenis komoditi yang diberikan untuk *management* pangan kepada pihak swasta seperti gandum, kedelai, jeruk dan daging sapi. Namun untuk komoditi pangan utama masih dikuasai atau diatur mekanismenya oleh bulog. Di era ini pun pernah melakukan impor gandum yang cukup besar dengan harga murah sebagai tindak lanjut bantuan pangan Amerika di awal dekade 1980-an. Namun kehadiran gandum masih tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan negara di kala itu karena ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap komoditas utama, beras dan jagung.⁵⁷

Pemerintah juga menciptakan serta mengembangkan pusat studi di bidang pertanian dengan menyangkut dukungan dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi. Badan peneliti yng diciptakan pemerintah tersebut mampu menghasilkan salah satu jenis varian padi dengan kode IR (*IndonesianRice*), varian taersebut adalah jenis unggulan lokal. Penelitian tersebut juga bertujuan untuk membangun inovasi peneliti Indonesia di beberapa jenis tanaman pangan yang sebelumnya didapatkan dari impor. Sayangnya, upaya untuk membangun kemandirian di sektor pertanian justru berakhir menjadi alur pergantian kekuasaan. Pada tahun 1965 situasi kebutuhan pangan pokok melambung tinggi, lantas pemerintah mengambil kebijakan untuk menghapus subsidi pupuk dan bibit di tahun 1994. Kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena semakin beratnya beban anggaran dalam APBN.

_

⁵⁷ Ibid, 18.

⁵⁸ "Mengurangi Pasang Surut Ekonomi Di Zaman Soeharto", Andryanto, Diakses 20 Mei 2021, https://indonesiainside.id/narasi/2019/06/08/mengurai-pasang-surut-ekonomi-di-zaman-soeharto

kesulitan dialami oleh petani dalam bercocok tanam karena faktor biaya modal tanam yang melambung jika hanya berpatokan pada padi. asuransi melalui pinjaman koperasi tidak lagi memberikan kemajuan untuk petani dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan 1 hektar, hal ini karena dampak dari revolusi hijau juga. Akibatnya, impor beras semakin besar dilakukan demi pemasokan pangan negara. Tidak hanya itu melainkan nilai tukar mata uang Rupiah mengalami penurunan semenjak tahun 1990 dan menyebabkan harga produksi beras serta kebutuhan pokok mengalami peningkatan yang tak terkendali. Pada tahun 1998, angka inflasi mencapai di atas angka 70% dan runtuhnya era presiden Soeharto. ⁵⁹

3. Era Reformasi

Setelah lengsernya masa presiden Soeharto, kondisi pangan Indonesia masuk ke babak baru di kebijakan-kebijakan pertanian guna menstabilkan pangan Indonesia. Liberalisasi di sektor pertanian diberlakukan ketentuan pasar yaitu mengambil alih harga kebutuhan pokok pangan. Pemerintah hanya menjadi pengatur tata kelolanya namun wawenang mengintervensi harga kebutuhan pokok tidak lagi dimiliki. Melalui surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.439 mengenai bea masuk, berisikan mengenai pemberhentian peran bulog yang mengatur impor beras. Karena hal itu, pihak manapun yang sesuai dengan ketentuan memiliki izin dan berhak untuk mengimpor beras.

⁵⁹ "Sejarah Kebijakan Pangan Di Indonesia: Tinjauan", Leo Kusuma, diakses 20 Mei 2021, http://leo4kusuma.blogspot.com/2013/03/sejarah-kebijakan-pangan-di-indonesia.html#.YLOJzy9gllA

⁶⁰ Ahmad Arif, Sagu Papua Untuk Dunia (Jakarta:Gramedia, 2019), 27.

Di masa kepemimpinan B.J. Habibie, gusdur atau Abdurrahman Wahid dan presiden Megawati, beras masih menjadi point utama pangan yang dikejar untuk pencapaian swasemabada pangan. Pada masa kepemimpinan di tiap preseiden tersebut, swasembada beras masih diprioritaskan dalam pencapaian kebijakan pangan. Untuk mensiasati kasus krisis ekonomi dan kemarau Panjang yang dialami negara, pemerintah sering kali mengatur straategi dengan menaikkan di harga dasar gabah, menciptakan kebijakan tambahan dalam berproduksi serta membuka jalan masuk bagi beras impor di pasar domestik. Di era ini juga program swasembada oleh BIMAS dan INMAS dikemas dan diperluas cakupannya ke dalam bentuk GEMA (Gerakan mandiri) untuk gerakan swasembada padi, jagung dan kedelai (PALAGUNG), swasembada protein hewani (PROTEINA), dan swasembada hortikultura (HORTINA). Untuk mengawal keberhasilan sebagaimana program BIMAS dan INMAS, pemerintah menyediakan tenaga pendamping dari perguruan tinggi di Indonesia yang dikoordinir oleh Institut pertanian bogor (IPB) dan mengalokasikan anggaran APBN yang sangat besar guna menyediakan kredit bagi petani (kredit usaha tani-KUT). Dalam kurung waktu singkat kebijakan ini belum memunculkan pengaruh yang sudah diharapkan sebelumnya, namun pemerintah mampu melakukan larangan impor tidak hanya pada masa panen raya saja tetapi dilakukan setahun penuh pada tahun 2005.61

-

^{61 &}quot;Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan", Badan Ketahanan Pangan, diakses 21 Mei 2021, http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Buku_Dasawarsa_BKP.pdf.

Masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid di sekitar tahun 1998 hingga 2000, merupakan masa kelam bulog. Setelah hak bulog untuk monopoli beras dicabut, pasar beras nasional tidak lagi diintervensi bulog. Hal ini dikarenakan mekanisme pasar telah mengambil peran impor maupun Distribusi. Tidak hanya itu, penyaluran beras dengan harga tetap kepada Porli dan TNI tidak lagi diberikan kepada bulog. Akibatnya, Bulog tidak punya peran yang jelas dalam segmetasi pasar sehingga berdampak pada ketidakefisien Bulog terhadap peran monopoli harga gabah maupun beras.⁶² Pada tahun 1999, badan urusan ketahanan pangan (BUKP) dibentuk melalui Keppres No. 136 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi tata kerja departmen yang diharapkan dapat terorganisasi dengan lebih baik melalui keputusan tersebut dikemukakan bahwa badan ini mempunyai tugas untuk mengkaji dan pengembangan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di masa presiden Abrurrahman Wahid penanganan Distribusi pangan dilakukan juga oleh Bulog dengan ruang lingkup tugas yang sama untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan.⁶³

Di era presiden megawati (2001-2004), bulog Kembali hidup dalam menjalankan peran yang semestinya yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 7 tahun 2003. Pemerintah lebih teliti dalam penetapan peran bulog guna terhindar dari pelanggaran ketetapan yang sudah diatur melalui Lol di tahun

⁶² Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, (Bandung: PT.Primamedia Pustaka, 2004), 28.

^{63 &}quot;Sejarah Pertanian Indonesia", diakses 21 Mei 2021, http://bkp.pertanian.go.id/sejarah

1998. Melalui peraturan pemerintah tersebut, bulog diberikan wewenang dalam perannya yang pertama kali dijadikan sebagai Lembaga logistik. Peran Bulog membawa dua misi, yaitu *Public Service Obligation* dan misi komersial. Pada peranannya di tujuan publik atau PSO, Bulog dijadikan sebagai satu-satunya pemasok Raskin atau beras miskin dengan harapan dapat memonopoli harga beras dan ketahanan pangan pun diharapkan stabil. Melalui peraturan pemerintah tersebut Bulog yang awalnya adalah Lembaga Pemerintah Non-Dapartemen (LPND) akhirnya berada di bawah naungan kementrian BUMN yang menjadikannya sebagai perusahaan umum.⁶⁴

Presiden Megawati membuat kebijakan harga pembelian pemerintah (*Procurement Price*) menggantikan kebijakan sebelumnya, kebijakan harga dasar. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan menjadikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2002 sebagai rujukan penetapan kebijakan pada beras. Secara konsepsional, harga yag dibeli oleh pemerntah tidak sama dengan harga dasar (*Floor Price*) yang dibeli atau diperoleh. Konsep dari harga pembelian tidak tergantung pada target kuantitas, yakni pembelian harga tertentu pada jumlah pembelian. Konsep tersebut tidak selalu memihak pada kepentingan petani, bahkan secara penerapannya, harga ideal yang diharapkan petani tidak akan terjamin. Dengan begitu, bisa dilihat bahwa pemerintah di masa Megawati sepertinya hanya ingin menggerakkan Kembali peran Bulog agar lebih cakap dalam mengfungsikan stabilisasi harga

-

⁶⁴ Bantacut Tajuddin, "Agenda Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2014-2019 (The Agenda of Agricultural Development and Food Security 2014-2019)", Jurnal Pangan, 23, No.3 (2014): 286.

secara kelembagaan. Meskipun begitu, stabilisasi harga hanya bersifat sementara karena gejolak impor tidak mampu ditahan.⁶⁵

Kebijakan harga pembelian di masa kepemimpinan presiden Megawati masih berlanjut atau masih diterapkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 66 Dalam kepemimpinan presiden SBY, semakin marak kebijakannya dalam perluasan komoditi pangan khususnya beras. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan poin-poin dari kebijakan dari kesepakatan yang sebelumnya belum dilaksanakan oleh pemerintahan di era sebelumnya. Paradigma kebijakan di sektor pertanian di masa Susilo Bambang Yudhoyono hanya meneruskan dari kebijakan yang telah lalu yaitu bergantung pada komoditi beras guna mencapai swasembada beras, Peran bulog dalam memonopoli impor beras Kembali didapatkan di masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono juga, hal tersebut didapatkan di akhir tahun 2007. Namun, kewenangan tersebut masih saja tidak bisa membantu dalam menangani tidak stabilnya harga beras di dalam negeri karena kenaikan harga. 67

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijakannya juga meyeret swasta untuk mengambil peran guna membangunga industri pertanian dengan kebijakannya, revitalisasi pertanian. Program tersebut telah diimplementasikan sejal tahun 2007 dengan fokus pengembangan di wilayah

⁶⁵ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, (Jakarta: PT.Primamedia Pustaka, 2004), 33.

⁶⁶ Ibid, 33.

⁶⁷ Suksmantri, Eko.,dkk, *Bulog Dalam Bingkai Ketahanan Pangan*, (Jakarta:CV.Padma Publisher, 2012), 22.

Kawasan timur. Kekurangan dari kebijakan tersebut yakni tidak melihat potensi serta keuntungan dalam pemanfaatan keragaman tanaman pangan lokal. rencana swasembada beras digambarkan tidak akan mampu melepaskan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras di akhir kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014.⁶⁸

Meskipun begitu, presidden SBY pernah merencanakan tentang pemanfataan keberagaman tanaman pangan lokal dikarenakan melihat potensi Indonesia yang memiliki keberagaman tanaman pangan yang sangat paling banyak di dunia. Kebutuhan karbohidrat sesungguhnya tidak bergantung pada beras. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu memperkenalkan tanaman pangan lainnya seperti sagu, singkong, ketela, jagung, kentang, ubi jalar, ataupun sejenis umbi-umbian, gula dan daging sapi ke nusantara melalui kebijakannya yaitu swasembada lima komoditas pangan.

Pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, BBKP diubah menjadi badan ketahanan pangan (BKP) pada tahun 2005. Perubahan nama tersebut terkait dengan pemantapan organisasi departemen pertanian yang efisien dan efektif yang diatur berdasarkan peraturan preseiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon I kementerian negara Republik Indonesia. Pada bagian IX tentang departemen

⁶⁸ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi* (Bandung: PT.Primamedia Pustaka, 2004), 37.

⁶⁹ Kementerian Pertanian RI, *Kinerja Satu Tahun Kementerian Pertanian: Oktober 2014-Oktober 2015* (Kementerian Pertanian RI Jakarta, 2015).

⁷⁰ Ahmad Arif, Sagu Papua Untuk Dunia (Jakarta: Gramedia, 2019), 34.

pertanian pasal 21 diktum K yang menyatakan bahwa BKP mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.⁷¹

4. Era Presiden Joko Widodo

Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo, kebijakan pangan yang tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Di masa kepemimpinan presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini merupakan sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan Kementerian Pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani serta penataaan sumber daya manusia.⁷² Adapun program ketahanan pangan presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

a. Ekspor/Impor Pangan

Impor pangan selama ini telah menjadi permasalahan bagi Indonesia.

Padahal Indonesia merupakan negara agraris dan dulunya adalah negara yang

71 "Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan", Badan Ketahanan Pangan, diakses 21 Mei 2021, http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Buku Dasawarsa BKP.pdf

⁷² "Esensi Kebijakan Pangan Era Amran: Menyayangi Petani", Kementerian Pertanian, diakses 21 Mei 2021, https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219.

mencapai Swadembada beras. Di era presiden Jokowi, ia menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengelolahan pertanian. Salah satu contoh komoditas yang ditargetkan dalam kebijakannya adalah beras dan jagung. Komoditas beras ditargetkan naik dari 5 ton gabah kering giling per hektar menjadi 5,6 hektar per hektar. Sedangkan produktivitas jagung meningkat dari 4,8 ton per tahun menjadi 5,6 ton per tahun.⁷³

Peraturan ketahanan pangan atas Impor/Ekspor hasil pertanian segar ditetapkan oleh Menteri peraturan Pertanian No.4 tahun 2015. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya hayati dan pencemaran kimia oleh produk pertanian segar dari luar. Lampiran peraturan ini meliputi: kriteria penerimaan konsentrasi residu pada masing-masing faktor kimia/biologis dari 86 jenis produk pertanian segar, sertifikasi sistem pemantauan keamanan, prosedur tertunda/batal/perpanjangan, dan tata cara pendaftaran Badan Pengawas Ketahanan Pangan di luar negeri Badan Karantina Pangan, Kementan.⁷⁴

Impor dari negara yang memiliki sistem pemantauan keamanan untuj produk pertanian segar membutuhkan pemberitahuan sebelumnya. Impor dari negara tanpa sistem tersebut memerlukan *Certificate of Analysis* di tambahan untuk pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan sebelumnya harus

⁷³ Santosa, Dwi Andreas," krisis pangan dan kebangkitan petani", (Kompas, 13 Juni 2014).

48

⁷⁴ BKP, *Laporan ketahanan pangan BKP*, (Jakarta:Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016), 11.

dikeluarkan sebelu mengemas produk ke kapal pengiriman oleh eksportir dalam pengiriman di negara. Jika beberapa perubahan kapasitas muat di negara transit terjadi, penerbitan pemberitahuan sebelumnya untuk tramsit di negara transit juga diperlukan selain *prior notice* di negara pengirim. Pemberitahuan yang sebelumnya dan pemberitahuan sebelum transit harus dikirim dari eksportir secara onlie ke karantina makanan, MoA, untuk mendapatkan kode khusus.⁷⁵

Ekspor produk pertanian segar dari Indonesia ke negara lain perlu diterbitkan sertifikat untuk memenuhi ketentuan peraturan pemantauan keamanan di negara tujuan. Dianggap sebagai negara yang memiliki sistem pemantauan keamanan produk pertanian segar oleh Indonesia, seseorang membutuhkan GAP, GHP dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan menerapkannya. Mendapatkan sertifikasi dari Indonesia, Lembaga pemantau keamanan produk pertanian segar di negara atau kedutaan besar di Indonesia harus mengajukannya kepada Menteri Pertanian melalui karantina makanan, MoA. Meskipun negara tersebut telah disertifikasi dan memiliki sistem pemantauan keamanan untuk produk pertanian segar karantina Indonesia tidak mengizinkan produk dari dalam tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau jika berkode tidak sama dengan negara pengirim.

Untuk mengimpor produk pertanian dan perternakan segar dari Jepang, seseorang harus menyerahkan sertifikat tidak tercemar bahan radioaktif ke karantina di pelabuhan, tanpa itu, pusat teknologi metrologi keselamatan dan

49

⁷⁵ Ibid..

badan radiasi nuklir nasional melakukan pemeriksaan sampel. Selama pemeriksaan, produk impor pertanian dan perternakan segar ditahan. Produknya bisa diimpor jika hasilnya dibawah standar. Semua biaya dalam hal ini harus dibayar oleh pemilik produk tanpa menuntut ganti rugi kepada pemerintah Indonesia. Standar maksimum yang diizinkan untuk bahan nonpolusi radioaktif direvisi dalam peraturan Menteri Pertanian No.66 tahun 2014 sebagai berikut. Daging dan produk dari 100 kg hingga 500 kg; bijibijian seperti jagung, barley dan gandum, buah-buahan segar dan sayuran, susu dan produk pertanian dan perternakan segar lainnya.

b. Menanggulangi Kemiskinan dan Regenerasi Pertanian

Dalam program ini, Presiden Jokowi bertujuan untuk mengatasi kemiskinan petani serta ingin meregenerasi petani. Kemiskinan oleh petani disebabkan oleh ketidakcukupan pendapatan dari hasil tani, fluktuasi harga, kegagalam panen. Dalam memudahkan petani, presiden Jokowi berniat untuk membangun infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti bendungan, jalan raya, dan lain-lain. Regenerasi sangat penting dilakukan dengan melihat usia petani Indonesia. Di tahun 2014, Usia petani 61,8% berusia di atas 45 tahun, 26% berusia 35 tahun-44 tahun, dan 12% berusia kurang dari 35 tahun.⁷⁷ Usia mayoritas petani tesebur menjadi faktor penurunan produktivitas sektor pertanian. Selain teknologi yang digunakan,

⁷⁶ JICA, Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion,(Jakarta:JICA, 2017)

⁷⁷ Komisi Pemilihan Umum, Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian: Visi, Misi Dan Program Aksi Jokowi Dan Jusuf Kalla 2014, (Jakarta: 2014), 27.

regenerasi pertanian tidak dimaksudkan untuk menambah jumlah jumlah petani, melainkan agar regenerasi muda dapat masuk ke dalam sektor pertanian dan dapat menghasilkan output yang maksimal. Dalam hal tersebut, peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi dengan investasi. ⁷⁸

c. Implementasi Reformasi Agraria

Program yang ketiga adalah implementasi reformasi agraria. Pengertian program tersebut dalam arti lainnya adalah petunjuk dalam menyusun kembali mengenai hak milik, hak kuasa, dan penerapan sumber pertanian, salah satunya adalah tanah. Dengan program tersebut diharapkan agar petani memiliki lahannya masing-masing dan mengurangi petani menggarap lahan bukan miliknya. Presiden Jokowi mentapkan agar tiap petani memiliki luas tanah atau lahan sebesar 1 hektar, penetapan luasnya lahan tersebut akhirnya dibuka pertama di daerah Jawa dan Bali. Kebijakan selanjutnya adalah membangun fasilitas bisnis di bidang pertanian, dalam hal lain disebut sebagai pembangunan agribisnis kerakyatan. Di dalam kebijakan tersebut, koperasi dan UKM, pembentukan bank khusus tani merupakan implementasi dari kebijakannya. Pembangunan agribisnis kerakyatan tesebut bertujuan untuk mendapatkan dana yang cukup bagi sektor pertanian. Tidak hanya itu, implementasi Bank khusus tani juga diperlukan dikarenakan bank-bank

⁷⁸ "Kebijakan Ketahanan Pangan Jokowi", Muhammad Mufid Martami, diakses 21 Mei 2021, https://www.kompasiana.com/kanopi_feui/55e98d9f8e7e61b90ab31707/kebijakan-pangan-jokowi-jalan-menuju-ketahanan-pangan-indonesia

⁷⁹ "Presiden Serahkan 3 Juta Hektar Untuk Rakyat", Lusia Arumingtyas, diakses 21 Mei 2021, https://www.mongabay.co.id/2021/01/07/presiden-serahkan-3-jutaan-hektar-lahan-untuk-rakyat-jawab-persoalan-agraria/

selama ini merasa enggan dan sedikit untuk meminjamkan dananya karena merasa resiko sektor pertanian terlalu tinggi.⁸⁰

Pemerintah Presiden Joko Widodo membuat 9 agenda pembangunan nasional (Nawacita). Sektor pertanian dan perternakan terkait dengan agenda ke enam dan ke tujuh. Agenda ke enam, terwujudnya bangsa yang produktif dan berdaya saing internasional tinggi, mengarahkan untuk pengembangan agroindustri. Agenda ke tujuh mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memobilisasi sektor ekonomi nasional, mengarah pada kedaulatan pangan. Pengembangan agroindustri penguatan kedaulatan pangan bisa menjadi dua sasaran utama MoA selama lima tahun, 2015-2019. Indonesia akan menargetkan untuk mewujudkan peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif dan peningkatan nilai tambah produk olahan di sektor pertanian dan perternakan.⁸¹

Produksi dalam Renstra Kementerian Pertanian

Kebijakan Presiden Joko Widodo pada sektor ketahanan pangan didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dituang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan dikenal dengan istilah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun target dari strategi kebijakan Kementan dalam programnya sebagai berikut:⁸²

1. Meningkatkan Diverifikasi Pangan

Komisi Pemilihan Umum, Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri
 Dan Berkepribadian: Visi, Misi Dan Program Aksi Jokowi Dan Jusuf Kalla 2014 (Jakarta: 2014)
 JICA, Data Collection Survey And Agricultural Product Distribution System Of Food

Industry In Indonesia (Jakarta: JICA, 2013).

⁸² Kementerian Pertanian, *Laporan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019* (Jakarta, kementan, 2019), 4-12.

Dalam meningkatkan diverifikasi pangan, Kementan berfokus untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat dengan 1). Memberdayakan 350 kelompok tani bersama per tahun dan memberdayakan 1.500 lumbung padi per tahun, 2). Tindakan terhadap krisis pangan dan kekurangan pangan dengan mengembangkan model daerah swasembada pangan di lebih dari 200 daerah per tahun dan penguatan kesadaran konsumsi pangan dari sistem gizi di lebih dari 450 lokasi, 3). Meningkatkan diverifikasi dalam mengonsumsi pangan dan gizi dengan mengembangkan objek yaitu kawasan rumah di sektor pangan yang berkelanjutan di pedesaaan dengan total lebih dari 4.500 desa per tahun, pengenalan diverifikasi konsumsi pangan, meningkatkan pola pikir untuk mengkonsumsi berbagai makanan dengan berpedoman dan bertujuan mendapatkan gizi yang seimbang, peningkatan keterampilan untuk mengembangkan makanan yang diolah di darerah setempat dan pengembangan dan sosialisasi yang sesuai teknologi pengolahan pangan lokal, 4). Menjadikan distribusi pangan di masyarakat meningkat dengan membangun tempat makanan seperti lumbung, gudang disertai fasilitas untuk olahan setelah panen di setiap wilayah, menjadikan daerah terpencil semakin kuat di sistem logistik nasional dengan tujuan memperluas produk pangan, monitoring tempat penyimpanan serta harga pangan yang dikendalikan atau duatur melalui operasi-operasi pangsa pasar, pemetaan dan pengembangan keterkaitan rantai pasok komoditas pertanian dan rekomendasi pengolahan impor pangan.

2. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas

Dalam hal peningkatan daya saing dan produktivitas, Kementan fokus pada:

- a. Peningkatan nilai tambah, daya saing, substitusi ekspor dan impor.

 Persiapan dari pertanian desa serta pengembangan pertanian dengan meningkatakan beragam tanaman pasar ekspor melalui pemanfaaatan *Good* Praktek Pertanian (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), pendaftaran tanah dan pendaftaran bangsal pasca panen.
- Meningkatkan surplus dengan pemrosesan
 Mengembangkan 5000 unit untuk mengelolah potensi industri pangan dengan menjadikan pedesaan berbasis pertanian industri, fasilitasi dan penerapan mekanisme jaminan untuk pangan serta pengolahan pusat Kawasan bididaya penunjang yang terintegrasi
- c. Intervensi dan monopoli pasar domestic untuk substitusi Impor pengembangan 60 unit per tahun dan kelembagaan sarana produk pasar pertanian, promosi komoditas pangan di pasar domestik, menstabilkan harga hasil tani, pemanfaatan 100 unit layanan informasi pasar pusat untuk management jaringan pasar dengan bagus di pusat pengolahan dan pusat konsumsi.
- d. Meningkatkan Ekspor

Pelatihan serta binaan untuk memenuhi uji kualitas ekspor, potensi ekspor pasar yang dikembangkan dan penguatan peran atas pertanian di KBRI di masing-masing negara sebagai pasar yang cerdas.

3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Hortikultura Berdaya Asing

a. Pengembangan Kawasan Hortikultura

Memperluas 7.000 hektar lahan hortikultura per tahun, peningkatan kebun/lahan infrastruktur, pendaftaran 2.000 lahan untuk usaha hortikultura, fasilitasi 3.000 unit infrastruktur setelah panen, penggunaaan teknologi yang mumpuni, dan membangun desa organic dengan landasan pertanian hortikiltura.

b. Pengembangan sistem perbenihan

Lebih menguatkan lagi 158 lembaga yang berfokus dalam perbenihan, mulai dari penyediaan dan peerluasan..

c. sistem perlin<mark>du</mark>nga<mark>n hortik</mark>ultura rumah lingkungan yang dikembangkan

di tiap tahun dengan 650 sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) memusatkan dalam pengendalian hama, pembangunan 350 unit klinik pengendalian hama per tahun, meningkatkan kesadaran masayarakat.

4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kompetitif

a. Stabilisasi areal perkebunan

Pemantapan 100 ribu hektar lahan perkebunan per tahun, tersedianya lahan pembibitan unggul, memanfaatkan lahan yang kosong, penyediaan air melalui bendungan serta menyediakan mesin tani.

b. Meningkatkan produktivitas

Mengadakan seerta menyediakan benih yang bermutu, menerapkan produksi pertanian yang mumpuni, pengembangan pengendalian hama

c. Lembaga dan pembiayaan

Penguatan kelembagaan organisasi penelitian perkebunan dan penguatan hasil penelitian, penguatan kelembagaan usaha tani, peningkatan keterampilan petani, kredit fasilitasi dan interupsi usaha manajemen konlfik perkebunan.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

- a. Melindungi petani dengan menyediakan dan memperbaiki sistem

 Distribusi sehingga harga produksi lebih aman dengan disertai asuransi
 tani.
- b. Memberdayakan petani melalui Lembaga yang berfokus untuk memperkuat pertanian, meningkatakan kreatitas dan modal.
- c. Pemberian hak lahan bertani
- d. Pemberian kesempatan kepada petani untuk berpartisipasi dalam pengolahan hasi pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan
- e. Promosi usaha kelompok untuk meningkatkan efisiensi pertanian

Rencana strategis Kementan (2015-2019) di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo mencakup visi untuk mewujudkan sistem bioindustri pertanian yang berkesinambungan sehingga mampu menciptakan aneka ragam variates pangan yang sehat berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, Kementan memiliki tujuh kebijakan umum untuk mewujudkan empat misi, yang pertama yakni 1).

Meningkatkan produksi pangan. 2). pengembangan produk yang kompetitif untuk ekspor, yang nantinya sebagai bahan baku bioindustri. 3). Memperkuat Lembaga yang berfokus pada sistem pebenihan, petani, teknologi, pendidikan, karantina dan ketahanan pangan. 4). Mengembangkan dan memperluas kawasan pertanian. 5) berfokus pada strategi produksi. 6). Mengembangkan fasilitasi pangan dan *agroindustry* di desa. 7). tata pemerintahan yang baik.⁸³

Prioritas tertinggi di sektor pertanian dan perternakan di Indonesia telah menjadi pemasok bahan pangan dan mendorong kemajuan ketahanan pangan negara. Pada tahun 2015, peningkatan penduduk produktif (15-64 tahun), "bonus populasi" akan berlanjut hingga sekitar tahun 2030. Pasokan pangan yang stabil untuk semua orang diprioritaskan menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Produk terpenting dalam penyediaan pangan adalah beras, jagung, kedelai, tebu dan daging (daging sapi dan daging kerbau), dan kekurangan produk ini diisi dengan impor, namun impor mungkin menurunkan motivasi produk petani. Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan yang optimal antara produksi dan impor produk tersebut. Dari segi ketahanan pangan, pasokan bahan pangan tidak berhubungan positif dengan kerjasama dengan negara asing. Dalam produksi beras, pengalaman dan pengetahuan dalam negeri seperti perbaikan varietas unggul dan pengendalian hama telah terakumulasi.⁸⁴

-

57

⁸³ JICA, Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion (Jakarta: JICA,2017).

⁸⁴ JICA, Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion (Jakarta: JICA,2013).

Pemerintah Indonesia berusaha tidak hanya menyiapkan stok bahan pangan yang cukup tetapi juga untuk meningkatkan kualitas produk pertanian dan perternakan. Pemerintah cenderung memperkenalkan teknologi yang akan menyadari efeknya dalam jangka pendek seperti memperkenalkan varietas tanaman pertanian yang berdaya hasil tinggi atau inseminasi buatan ternak. Untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, Indonesia harus fokus tidak hanya pada produksi bahan pangan meningkat tetapi juga pada pengembangan hortikultura, seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa pemerintah daerah, dinas pertanian tidak mempermasalahkan pengolahan hasil pertanian karena itu dianggap sebgai tugas kantor manufaktur. Impor produk hortikultura dapat ditingkatkan jika masih minimnya kebijakan pemerintah di sektor hortikultura dalam negeri, dan motivasi produksi petani akan berkurang. Integrasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian untuk menstabilkan pendapatan petani mungkin menjadi target penting kerjasama dan kaloborasi. 85

Dalam mempertimbangkan kebutuhan kerjasama dan kaloborasi antara Indonesia dan Jepang, transfer teknologi diharapkan dari Jepang ke Indonesia. Menurut pihak Indonesia, teknologi yang dibutuhkan di bidang pertanian dan perternakan adalah teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan, pengolahan pasca panen, mejaga kesegaran, pengolahan pangan, dan lain-lain. Di Indonesia, dengan sistem rantai dingin yang buruk, teknologi untuk menjaga kesegaran dan pengolahan kering akan mengurangi kerugian dan biaya logistik produk pertanian dan perternakan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah Indonesia

85 Ibid..

selalu mengupayakan untuk menjalin kerjasama dengan Jepang di bidang pangan yang mengarah pada ketahanan pangan Indonesia.⁸⁶

Jepang telah lama melakukan kerjasama ekonomi melalui ODA ke Indonesia untuk menjaga politik, stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia melalui pembangunan sektor pertanian. Lokasi Indonesia secara geopolitik sangat penting bagi Jepang di Asia, terutama untuk mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah melalui wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dalam kerjasama ekonomi, pemerintah Jepang menitikberatkan pada pembinaan dan alih teknologi di bidang infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi untuk mendukung peningkatan produksi padi untuk mewujudkan swasembada dan peningkatan kualitatif dan kuantitatif produk pertanian dan perternakan. Jumlah perusahaan Jepang di sektor pertanian dan perternakan di Indonesia masih sedikit. Di perkebunan, PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate di Provinsi Sumatera Utara melakukan produksi karet dan pengolahan perkebunan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Toarco Toraja mengelola perkebunan kopi Indonesia sendiri dengan membeli dari petani dan mengekspor kopi arabika berkualitas tinggi ke Jepang.⁸⁷

Di bidang hortikultura, PT. Makanan Alami Pegunungan Hijau terletak di kota Malang, Jawa Timur. Perusahaan memproses dan mengekspor produk sayuran kering dan melakukan pembinaan budidaya di lahan pertanian. PT. Matahari Yasai Ks Buan di Kabupaten Lembang, Jawa Barat mengekspor singkong yang sudah dipanaskan dan didinginkan ke Jepang. PT. Java Agritech di Kabupaten

86 Op.Cit

⁸⁷ JICA, Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion, (Jakarta: JICA, 2017).

Banjarnegara, Jawa Tengah memproduksi wasabi beku dan rempah-rempah olahan untuk diekspor ke Jepang. Hingga Oktober 2016, ada 15 proyek di sektor pertanian yang telah dilaksanakan di Indonesia di bawah program berbasi proposal JICA dengan sektor swasta, salah satu program kerjasama yakni *The Public Private Partnership Project For The Improvement Of The Agriculture Product Marketing And Distribution System*. Dari jumlah tersebut, ada tiga kelayakan survei sektor swasta untuk pemanfaatan teknologi Jepang dalam proyek ODA, tiga verifikasi survei dengan sektor swasta untuk diseminasi teknologi Jepang, satu kemitraan UKM survey promosi, satu survey persiapan untuk infrastruktur KPS, lima survey persiapan untuk BOP promosi bisnis dan dua program kerjasama dengan swasta untuk diseminasi teknologi Jepang. Lima proyek menargetkan Jakarta atau Jawa, tujuh proyek menargetkan di luar Jawa.

Indeks Ketahanan Pangan Indonesia

Berkembang atau tidaknya pangan Indonesia dapat dilihat dari indeks ketahanan pangan negara. Ketersediaan data informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP No. 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, Menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut sangatlah penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para

88 Ibid.

pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.⁸⁹

Ketahanan pangan merupakan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP telah dikembangkan pada tatran global untuk menilai dan membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara. Global Food Security Index (GFSI) yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. 90

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu

_

^{89&}quot;Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, BKP, diakses 21 Mei 2021, http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/12038/Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁹⁰ Data dari BKP berupa laporan Dasawarsa Badan Ketahanan Pangan, pdf.

ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:⁹¹

- a. Hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global
- b. Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi
- c. Keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan
- d. Ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu serta mencakup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Indeks ketahanan pangan yang diukur sesuai indikator dan penliaian pemaparan diatas di tahun 2012 sampai 2013 yakni, di tahun 2012 indeks ketahanan pangan Indonesia mencapai 46,8 indeks. Di tahun 2013 menurun menjadi 45,6 indeks. Namun di tahun 2014 kembali naik per tahun hingga 2019. Di tahun 2014 mencapai 46,5 indeks. Di tahun 2015 mencapai 46,7 indeks. Meskipun naik di tahun 2014 dan 2015, indeks ketahanan pangan lebih kecil dari pada di tahun 2012, namun di tahun 2016 indeks ketahanan pangan naik lebih besar dari pada tahun 2012, 2014 dan 2015 yakni mencapai 50,6 indeks, di tahun 2017 mencapai 51,3 indeks. Indeks ketahanan pangan terus naik hingga di tahun 2018 yang mencapai 54,8 indeks, di tahun 2019 naik drastis hingga mencapai 62,6 indeks.

Adapun indeks ketahanan pangan sesuai indikator diatas yang diperoleh dari badan ketahanan pangan di tingkat per-provinsi di tahun 2019 sebagai berikut :92

Tabel 4.1 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi tahun 2019.

Peringkat	Provinsi	Skor	Peringkat	Provinsi	Skor

⁹¹ "Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018", Kementerian Pertanian, diakses 21 Mei 2021, https://www.pertanian.go.id

⁹² Badan Ketahanan Pangan, *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia*, laporan, 2019.

1	Bali	85,15	18	Gorontalo	66,06
2	DI Yogyakarta	83,63	19	Jambi	68,23
3	Sulawesi Utara	81,44	20	Sulawesi Tengah	68,17
4	Jawa Tengah	78,85	21	DKI Jakarta	66,87
5	Sulawesi selatan	78,69	22	Maluku Utara	66,58
6	Sulawesi Tenggara	76,99	23	Aceh	66,22
7	Kalimantan Timur	76,90	24	NTB	62,43
8	Jawa Barat	76,44	25	Riau	62,37
9	Sumatera Barat	75,43	26	Bengkulu	61,78
10	Kalimantan Selatan	<mark>74,</mark> 71	27	Sulawesi Barat	60,37
11	Banten	74,47	28	Kepulauan Riau	59,26
12	Jawa Timur	73,71	29	Kep.Bangka Belitung	56,03
13	Kalimantan Utara	73,12	30	Kalimantan Barat	55,17
14	Kalimantan Tengah	71,57	31	Maluku	52,35
15	Lampung	71,36	32	Nusa Tenggara Timur	50,69
16	Sumatera Utara	69,81	33	Papua Barat	30,12
17	Sumatera selatan	69,30	34	Papua	25,13

Sumber: Laporan Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan.

Pencapaian Kerjasama Jepang dan Indonesia

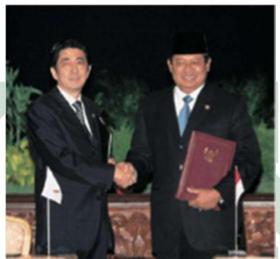
Setelah kemerdekaan Indonesia, dibawah kepemimpinan era Soekarno Indonesia bekerja keras untuk membangun gedung-gedung nasional meskipun berada di tengah kesulitan yang dihadapi. Pada tahun 1958, dilaksanakan proyek-proyek seperti pembangunan bendungan multi-fungsi, pembangunan pabrik dan sebagainya dengan menggunakan dana dari hasil perjanjian pampasan perang. Dengan dilantiknya Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno, pembangunan infrastruktur ditekankan untuk mendorong kemajuan negara dan menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indonesia terus mempertahankan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama 30 tahun. Pada kurun waktu tersebut, ada moment atau masa dimana Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan sumber daya dan melakukan reformasi struktur ekonomi. Pada saat masa itulah Jepang memberikan dukungan melalui pengadaan pinjaman komoditas.⁹³

Setelah krisis moneter Asia pada tahun 1997, terjadi gelombang demokratisasi dan desentralisasi. Meskipun kondisi politik sempat mengalami kekacauan, hal itu Kembali stabil saat dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipilih secara langsung melalui pemilihan untuk pertama kalinya. Melalui dialog kebijakan, Jepang telah memberikan dukungan yang luas dalam pengembangan infrastruktur di wilayah metropolitan Jakarta, menuju pertumbuhan

93 Japan International Cooperation Agency, *Pembangunan Indonesia An Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*, (Jakarta: JICA, 2018)

64

dan kemajuan secara berkelanjutan yang dipimpin oleh sektor swasta. Di masa kepemimpinan SBY inilah perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang yang dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dibangun pada 20 Agustus 2007.⁹⁴



Gambar 4.1 Perdana Menteri Shizo Abe Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berjabat Tangan Setelah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang Sumber: Biro Humas Kabinet Jepang

Dengan adanya IJEPA, ada langkah baru dalam hubungan Indonesia Indonesia-Jepang, yakni dengan dibentuknya kerjasama ekonomi melalui kerjasama bilateral dalam peningkatan kapasitas liberalisai baik di bidang jasa maupu di bidang barang, promosi dan fasilitas perdagangan, dan investasi di kedua negara. Kerjasama IJEPA memiliki tiga prinsip utama yaitu liberalisasi, fasilitasi serta peningkatan kapasitas. Liberalisasi tersebut berkenan dengan upaya Indonesia dan Jepang untuk mengikis hambatan yang ada antar kedua negara dalam menjalankan perdagangan maupun investasi. Fasilitasi bermanfaat untuk

_

⁹⁴ Ibid

^{95 &}quot;membangun mitra dagang Indonesia-jepang", muchtar, diakes 25 mei 2021, http://www.antara.co.id/arc2007/7/3/pertemuan-tiap-finalisasi-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-tokyo-jepang-21

menyediakan fasilitas antar negara dalam melakukan kerjasama seperti dalam hal standarisasi, bea masuk, Pelabuhan dan juga perbaikan iklim investasi. Peningkatan kapasitas berusaha memberikan peluang bagi produsen dari Indonesia untuk menaikkan daya saing produknya. Diadakannya kerjasama ekonomi bilateral ekonomi untuk pertama kalinya bagi Indonesia dan memilih Jepang sebagai partnernya tidak lain karena jepang telah menjalin hubungan dagang sejak lama serta Jepang merupakan salah satu yang terbesar dalam melakukan investasi di Indonesia. ⁹⁶

Jepang dan Indonesia merupakan partner dagang, mitra bisnis dalam perdagangan di antara keduanya berada di peringkat pertama perihal sumber impor dan tujuan. Banyak sekali peningkatan perdagangan antara keduanya, produk ekspor Indonesia ke Jepang juga lumayan banyak, terdiri dari gas bumi serta produk non-migas. Dengan negara teknologi, menjadikan Indonesia tertarik untuk mengimpor kebutuhan industri dalam negeri seperti mesin-mesin, perlengkapan elektronik, suku cadang kendaraan, besi baja, plastik, bahan kimia dan produk metal.⁹⁷

Dalam hal investasi, Jepang memandang bahwa Indonesia adalah pendorong utama untuk meningkatkan investasi Jepang di Kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut cantumkan pada survey JBIC perihal tujuan investasi Jepang kepada Indonesia. di tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dan naik di tahun

⁹⁶ Yusron Avivi, "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)", Jurnal ekonomi, 3, No. 1, 2020.

66

⁹⁷ Japan International Cooperation Agency, *Pembangunan Indonesia An Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*, (Jakarta: JICA,2018).

2007 menjadi yang ke-7. Jepang mendapatkan masalah dalam melakukan investasi di Indonesia, kendala tersebut yakni perihal keamanan serta perkembangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Kerjasama Indonesia di bidang energi pernah mengalami kekhawatiran Jepang untuk melanjutkan kerjasama setelah kontrak di tahun 2010 dan 2011 berakhir. Hal tersebut didasari karena tiap tahun import LNG Jepang naik 8 persen sehingga mengharuskan Jepang bernegoisasi dengan Australia, Brunei, Malaysia dan Indonesia..

Di bidang lingkungan hidup, pada tahun 2008 pemerintah secara resmi melaksanakan kerjasama di bidang lingkungan hidup. Dalam kerjasama tersbut, Jepang telah membantu Indonesia dengan memberikan atau mengalokasikan dana sebesar 10 milyar dolar dengan jangka waktu lima tahun melalui kebijakan *cool earth partnership*. Di Indonesia, Jepang dan Indonesia membangun Lembaga persahabatan, salah satu Lembaga tersebut adalah perhimpunan persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) dan perhimpunan alumni dari Jepang (PERSADA). Jepang dan Indonesia juga saling menyukai pariwisata negara. Kunjungan pariwisata Jepang ke Indonesia pada tahun 2007 sesuai data dari Depbudpar menunjukkan bahwa total Indonesia dikunjungi oleh wisatawan Jepang adalah sebanyak 508.820 orang.

_

⁹⁸ "Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies" diakses 21 mei 2021, https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/press_en/2007/11/7079/01.pdf

⁹⁹ Japan International Cooperation Agency, *Pembangunan Indonesia An Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*, (Jakarta: JICA,2018).

^{100 &}quot;25 tahun Kerjasama Indonesia-jepang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", HUMAS KLHK, diakses 22 mei 2021, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/985

¹⁰¹ Dian Effendi, Tonny , *Diplomasi Public Jepang : Perkembangan Dan Tantangan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

^{102 &}quot;jepang kunjungan wisatawan" CEIC data, diakses 22 mei 2021, https://www.ceicdata.com/id/indicator/japan/visitor-arrivals.

Jepang adalah negara yang memiliki peranan penting guna mengembangkan sumber daya manusia (SDM), dalam mengembangkan SDM tersebut, Indonesia dan Jepang melaksanakan Kerjasama di bidang Pendidikan. Fokus dari Kerjasama ini adalah memajukan pemuda guna mencapai kemakmuran negara masing-masing, penukaran siswa dilakukan dan beasiswa juga sebagai implementasi dari kerjasana tersebut. 103 Jepang juga sering memberikan bantuan dana untuk kemajuan ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Bantuan ekoknomi tersebut sudah dilakukan Jepang sejak tahun 1954. Bentuk dari bantuan tersebut berupa pelatihan industri, komunikasi, pertanian hingga Kesehatan. 104 Batuan Jepang kepada Indonesia lebih condong pada tiga jenis bantuan, yaitu 1). Bantuan dana hibah maupun pinjaman ODA serta 2). Bantuan teknik dengan skema membantu infrastruktur serta sumber daya manusia. Selama 9 tahun berturut-turut, anggaran dari ODA kepada Indonesia menurun dari yang awalnya 729,3 milyar yen menjadi 700,2 milyar yen di tahun 2008. Kebijakan ODA lebih berfokus dan menempatkan prioritas di aspek Human Securty, menanggulangi kemiskinan serta Sustainable Development Goal (SDG).¹⁰⁵

Di tahun 2014, JICA melalui ODA meresmikan kerjasama dalam "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019" yang dikembangkan oleh Presiden Joko Widodo dan salah satunya berfokus untuk mengurangi kesenjangan ekonomi daerah dan menciptakan masyarakat yang stabil. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memprioritaskan ketahanan pangan

.

¹⁰³ Ogoura, *Japan's Cultural Diplomacy*, (japan: The Japan Foundation, 2009). 15.

¹⁰⁴ Ibid, 20

¹⁰⁵ Japan International Cooperation Agency, *Pembangunan Indonesia An Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan* (Jakarta: JICA, 2018)

sebagai tantangan utama pembangunan nasional dan bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan yang lebih tinggi dengan meningkatkan produksi pertanian beras dan tanaman lainnya. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, akhir-akhir ini dihadapkan pada abrasi pantai di setiap wilayah. Oleh karenanya koservasi pesisir merupakan isu mendesak dari sudut pandang sektor pariwisata hingga akhirnya ringkasan dari tiga proyek ODA yang disediakan oleh perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut :¹⁰⁶

- 1. Proyek modernisasi irigasi rentang (jumlah pinjaman: 48,237 milyar yen)
- 2. Proyek irigasi komering (jumlah pinjaman: 15,896 milyar yen)
- 3. Proyek konservasi pantai Bali (jumlah pinjaman: 9,855 milyar yen)

Adapun ringkasan perkembangan kerjasama JICA di Indonesia sebagai berikut: 107

Tabel 4.2 Perkembangan Kerjasama Jepang di Indonesia.

No.	Tahun	Agenda/Bentuk Kerjasama		
1	1954	TKI mengikuti program pelatihan di Jepang		
2	1957	Pengiriman tenaga ahli Jepang ke Indonesia		
3	1958	Pemberian bantuan kepada Indonesia dalam bentuk reparasi		
		perang		
4	1961	Pembentukan Overseas Economic Cooperation Fund		
		(OEFC) yang mengambil alih Southeast Development		
		Cooperation Fund		
5	1962	Pembentukan Overseas Technical Cooperation Agency		
		(OCTA)		
6	1966	Pinjaman ODA pertama ke negara berkembang		
7	1968	Pinjaman ODA pertama ke Indonesia		
8]	Pemberian bantuan pangan kepada Indonesia dalam bentuk		
		beras		

^{106 &}quot;Signing of Japanese ODA Loan Agreements with Indonesia: Supporting food security and the promotion of the tourism industry" diakses 22 mei 2021, https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/170330_03.html

69

^{107 &}quot;agriculture transformation & food security 2040", diakses 22 mei 2021, https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12145561.pdf

9	1969	Pendirian kantor cabang OCTA dan OECF di luar negeri di Indonesia
10	1972	Pinjaman ODA langsung tanpa ikatan
11	1974	OCTA berganti nama menjadi <i>Japan International</i>
		Cooperation Agency (JICA)
12	1976	Pemberian bantuan hibah sebagai skema ODA Jepang
		umum
13	1981	Peserta pelatihan Indonesia mengikuti TCTP (Third
		Country Training Program)
14	1984	Program persahabatan pemuda
15	1986	Bantuan khusus untuk keberlanjutan proyek (SAPS)
16	1988	Bantuan khusus untuk perumusan proyek (SAPROF)
17		Pengiriman JOCV (ahli muda) ke Indonesia
18	1992	(Pinjaman ODA) bantuan khusus pelaksanaan proyek
		(SAPI)
19	1996	Bantuan khusus untuk kebijakan dan proyek pembangunan
		(SADEP)
20	1997	Pemb <mark>eri</mark> an bantuan pangan kepada Indonesia sebagai
		dukungan terhadap krisis moneter
21	1998	Pengiriman SV (Silver Experts) ke Indonesia
22		Program pemberdayaan masyarakat (CEP) di Indonesia
23	1999	Pendirian Japan Bank For International Cooperation
		(JBIC)
24	2001	Program kemitraan JICA (JPP) di Indonesia
25	2003	JICA diluncurkan Kembali sebagai Lembaga administrasi
		independent
26	2008	JICA bergabung dengan JBIC membentuk JICA "baru"
		yang menyediakan kerjasama pinjaman ODA dan bantuan
		hibah
27	2016	Proyek JICA dan Indonesia dalam kemitraan publik-swasta
		untuk perbaikan sistem pemasaran dan Distribusi produk
		pertanian

Sumber: Agriculture Transformation & Food Security 2040, laporan JICA. (diolah peneliti dari narasi laporan JICA ke dalam bentuk tabel)

Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengimplementasikan proyek-proyek yang berpusat pada kemitraan antara pemerintah lokal Jepang dan Indonesia dan proyek berbasis lokal proposal oleh pemerintah Jepang dan

perusahaan swasta. Pemerintah daerah Jepang dan entitas swasta memiliki pengetahuan bagaimana memajukan industri lokal dan teknologi pertanian yang canggih. Oleh karena itu, diharapkan kemitraan antara pemerintah daerah kedua negara dan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan swasta dapat berkontribusi untuk memperkuat daya saing dan menambah nilai bagi pertanian Indonesia. 108

Pembangunan sektor pertanian dan perternakan di Indonesia dilakukan oleh kementerian pertanian. Renstra saat ini menekankan pada sektor: 1). Produksi dan produktivitas perbaikan (khususnya beras, jagung, kedelai, tebu dan daging), 2). Diverifikasi pangan, 3). Peningkatan daya saing dan nilai tambah, 4). Penyediaan bahan baku bioenergy dan bioindustri, dan 5). Kesejahteraan petani. Situasi sektor pertanian dan perternakan di Indonesia berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, pasca panen, kesegaran pemeliharaan, pengolahan makanan dan industrialisasi. Jepang mendapatkan hambatan dalam mendirikan usaha di bidang pertanian dan perternakan di Indonesia. Pertama, rasio 100% modal asing tidak diperbolehkan. Kedua, ada prosedur rumit untuk memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, perusahaan Jepang perlu memperhatikan Good Agricultural Practice (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang belum umum di Jepang. 109

¹⁰⁸ JICA, Data Collection Survey And Agricultural Product Distribution System Of Food *Industry In Indonesia* (Jakarta: JICA, 2013) ¹⁰⁹ Ibid,.

C. Implementasi Program Kerjasama Kementan dan JICA Dalam Public

Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture

Product Marketing And Distribution System

Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System ini berlangsung empat tahun dimulai dari Maret 2016. Nama lain dari program tersebut adalah kerjasama Pemerintah-Swasta Untuk Peningkatan Sistem Pemasaran Dan Distribusi Produk Pertanian, nama singkat proyek ini adalah "IJHOP4". Program tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah yang dipilih menjadi model. Proyek ini melakukan pengembangan dan validasi model produksi dan distribusi untuk menciptakan sistem pemasaran yang aman dan baik antara petani dan pasar modern. Di sisi lain, proyek ini juga diharapkan untuk mempromosikan produk holtikultura dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien. 110

^{110 &}quot;press release", JICA, diakses 22 Mei 2021, https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press171023_ina.pdf



Gambar 4.2 Pertemuan Koordinasi Kerjasama Kementan-JICA Sumber: Badan Hortikultura

Ketua Tim proyek dari JICA, Tsutomu Nishimura mengatakan, dalam empat kali proyek kemitraan, ada 91 kelompok tani yang berhasil mendapat pembinaan dan pelatihan. Apabila dihitung sejak April 2016 hingga September 2019, terdapat 1.214 petani yang masuk dalam kategoteri proyek kerjasama ini. Dalam kegiatan tersebut juga mengundang petani Jepang guna studi banding sistem budidaya, pemasaran dan Distribusi di Jepang dengan Indonesia. Proyek tersebut adalah kerjasama yang holistik, di mana petani mendapat bantuan benih, sarana produksi pertanian, akses perbankan hingga dihubungkan ke pasar. Dari mulai benih, pupuk dibantu, kemudian sampai SOP budidaya dan sarana produksi, perencanaan, pemeliharaan sampai pemasarannya didampingi selalu oleh JICA. Program kerjasama JICA-Kementan tentu saja berpengaruh tinggi terhadap kemajuan

ketahanan pangan Indonesia.¹¹¹ Spesifikasi kriteria, penetapan calon petani calon lokasi dan implementasi dari proyek tersebut diatur oleh pemerintah Indonesia.

Implementasi dari kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. BANTUAN BENIH dan SARANA PRODUKSI PERTANIAN¹¹²

A. Penetapan Lokasi Bantuan Pemerintah

- a. Kriteria Lokasi
- 1) Lahan sawah, lahan kering/ladang, lahan kehutanan (perhutani, inhutani, perhutanan sosial), lahan perkebunan (swasta, BUMN, rakyat), tegalan, eks tambang.
- 2) Lahan/tanah milik Lembaga Pemerintah seperti milik TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, sekolah, pemerintah daerah yang belum/tidak dimanfaatkan.
- 3) Lahan/tanah milik lembaga non-pemerintah seperti lahan milik yayasan, pesantren, gereja, koperasi berbadan hukum, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya yang belum/tidak dimanfaatkan.

b. Lokasi Penerima

Lokasi penerima bantuan benih padi dan jagung yang dialokasikan di Satker
 Pusat, berdasarkan usulan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Lembaga

^{111 &}quot;Kerjasama kementan-jica dorong petani hasilkan produk hortikultura", sapto fama, diakses 22 mei 2021, https://monitor.co.id/2019/09/13/kerjasama-kementan-jica-dorong-petani-hadirkan-produk-hortikultura-berkualitas/

¹¹² kementerian pertanian, *Petunjuk Bantuan Benih Tanaman Pertanian*, (Jakarta: kementan, 2016)

Pemerintah/Lembaga Non-Pemerintah kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang belum dianggarkan melalui dana Tugas Pembantuan maupun APBD.

2) Lokasi penerima bantuan benih padi dan jagung yang dialokasikan di Satker Tugas Pembantuan (Provinsi), pembagian alokasi per Kabupaten/Kota sampai kelompok tani ditetapkan oleh Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan potensi, kemampuan dan sasaran produksi padi dan jagung.

B. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Kriteria Penerima Bantuan
- 1) Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan sudah resmi masuk dalam Surat Keputusan (SK) tingkat Bupati/Walikota atau petani yang sudah mendapatkan rekomendasi hak terpilih.
- 2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Tani Kebun (KTK), Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok masyarakat, kelompok tani millenial, instansi pemerintah, dan instansi non-pemerintah yang memiliki lahan dan sebagai pelaksana program dengan dibuktikan melalui surat rekomendasi dari Dinas Provinsi/Dinas maupun Dinas Kabupaten/Kota.

b. Syarat Penerima Bantuan

- Penerima bantuan mempunyai keabsahan dari instansi yang berwenang
 (Dinas Pertanian Kabupaten/Kota);
- 2) Penerima bantuan menguasai lahan dan sebagai pelaksana program serta tidak menerima bantuan sejenis pada tahun yang sama, dikecualikan yang terkena bencana dapat menerima bantuan sejenis pada tahun yang sama.
- 3) Penerima bantuan siap untuk mengerjakan atau melakukan program dengan baik dan disiplin serta siap untuk membeli sarana produksi sesuai rekomendasi teknologi, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Seluruh bantuan yang telah diterima petani pelaksana kegiatan tidak untuk diperjual belikan.

C. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

- 1) Dilakukan sosialisasi atau informasi secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat kelompok tani mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Calon penerima bantuan membuat usulan permohonan bantuan pemerintah kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kostratani/BPP/PPL/Petugas Lapang.
- 3) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memverifikasi dan melakukan penetapan daftar CPCL sebagai penerima bantuan benih yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) paling tidak memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, NIK/KTP, jumlah bantuan, varietas,

provitas existing, provitas target, jadwal tanam dan foto lahan. Khusus untuk foto lahan, dokumen diarsipkan di Kostratani.

- 4) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas kebenaran CPCL yang meliputi kelompok tani, luas lahan, varietas dan volume bantuan benih yang diusulkan, dituangkan dalam Surat Pernyataan Kebenaran CPCL.
- 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima bantuan
- 6) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat surat Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) per Kecamatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti pada form 3, apabila di kecamatan tersebut tidak ada petugas lapangan, dapat ditugaskan petugas dari kecamatan terdekat.
- 7) Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen CPCL yang diusulkan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan melakukan verifikasi lapangan dengan cara uji petik untuk meyakinkan kebenaran CPCL.
- 8) surat rekomendasi daftar CPCL dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Dengan skema penerima bantuan mengusulkan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 9) Kepala Dinas Pertanian Provinsi bertanggungjawab atas persetujuan daftar CPCL penerima bantuan benih yang telah diterbitkan.

- 10) Direktur Perbenihan melakukan verifikasi kelayakan usulan CPCL, seleksi dan menetapkan CPCL penerima bantuan melalui Surat rekomendasi.
- 11) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Benih Padi/Jagung Tahun Anggaran 2020 memuat keterangan atau informasi nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, NIK/KTP, jumlah bantuan, varietas, provitas eksisting, provitas target, dan jadwal tanam.

D. Alokasi, Volume dan Spesifikasi Bantuan Benih

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Pangan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan produksi, serta kualitas komoditas utama pangan untuk mencapai Swasembada pangan. Komoditas utama adalah padi, Jagung kedelai. Disamping ketiga komoditas utama tersebut juga menetapkan program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman lainnya yakni sayuran serta umbi-umbian seperti, tomat, brokoli, cabai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Penetepan tersebut untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan di sub sektor tanaman pangan.

Alokasi dan Volume

- i. Padi Inbrida, volume bantuan benih padi inbrida maksimal 25 Kg/Ha.
- ii. Padi Hibrida, volume bantuan benih padi hibrida maksimal sebanyak 15Kg/Ha.
- iii. Jagung Hibrida, volume bantuan benih jagung hibrida maksimal sebanyak 15 Kg/Ha.
- iv. Sayuran, volume bantuan benih sayuran maksimal sebanyak 10 Kg/Ha.

v. Umbi-umbian, bantuan benih umbi-umbian maksimal sebanyak 10 Kg/Ha.

E. Spesifikasi Teknis

a. Benih padi Inbrida

- 1) jenis benih yang diproduksi lebih diutamakan untuk varietas-varietas baru seperti inpari, inpago, inpara atau varietas yang dihasilkan oleh swasta dan lembaga/perguruan tinggi lainnya.
- 2) Varietas lokal yang telah didaftar oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 3) Benih bersertifikat minimal dengan diketahuinya kualitas sesuai aturan
- 4) Masa edar benih minimal satu bulan sebelum kadaluarsa saat diterima petani.
- 5) cara mengemas benih adalah dengan penggunaan bahan yang aman dari air dan aman dari air dan udara dengan menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.
- 6) Kemasan benih bertuliskan "Bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan".

b. Benih Padi Hibrida

- 1) jenis benih yang diproduksi adalah hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, lembaga/perguruan tinggi lainnya dan swasta.
- 2) Benih bersertifikat minimal memiliki kualitas sesuai aturan.
- 3) Masa edar benih minimal satu bulan sebelum kadaluarsa saat diterima petani.
- 4) pengemasan benih dilakukan dengan penggunaan bahan yang aman dari air dan udara dengan menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 8-10 micrometer dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.
- 5) Kemasan benih bertuliskan "Bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020, barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan".

c. Benih Jagung Hibrida

- benih yang akan diproduksi merupakan hasil penelitian Badan Litbang
 Pertanian, lembaga/perguruan tinggi lainnya dan swasta.
- 2) Benih bersertifikat minimal memiliki kualitas yang sesuai aturan.
- 3) Masa edar benih minimal satu bulan saat diterima petani.
- 4) pengemasan benih dilakukan dengan menggunakan bahan yang aman dari air dan udara dengan menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 8-10 *micrometer* dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.

5) Kemasan benih bertuliskan "Bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan".

d. Sayuran dan Umbi-umbian

- benih yang akan diproduksi merupakan hasil penelitian Badan Litbang
 Pertanian, lembaga/perguruan tinggi lainnya dan swasta.
- 2) Benih bersertifikat minimal memiliki kualitas sesuai aturan
- 3) Masa edar benih minimal satu bulan saat diterima petani.
- 4) pengemasan benih menggunakan bahan yang aman dari air dan udara dengan menggunakan plastik *Poly Ethylene* (PE) berukuran 8-10 *micrometer* dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kg.
- 5) Kemasan benih bertuliskan "Bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan".

e. Pengorganisasian

Pengorganisasian bertujuan untuk memudahkan dan menjadikan sistematika bantuan lebih teratur. Pengolahan bantuan dilakukan secara terorganisir dan terstruktur mulai dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga lapangan.

Dalam rangka efektivitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih pada kegiatan bantuan pemerintah benih padi dan jagung, diperlukan organisasi pengelola kegiatan sebagai berikut:

- PPK menetapkan tim pendukung (Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang/P3B) dalam pelaksanaan penyaluran bantuan benih padi dan jagung.
- Keanggotaan Tim Pengawalan dan Monitoring berasal dari unsur Direktorat
 Jenderal Tanaman Pangan yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Tim Supervisi dan Pengawalan berasal dari unsur Inspektorat Jenderal,
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 4. Tugas masing-masing tim adalah sebagai berikut:
 - a) Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) bertugas memeriksa kelengkapan dokumen benih, yaitu sertifikat hasil uji laboratorium dari BPSB asal benih atau dari produsen benih yang menerapkan sistem manajemen mutu, dan hasil pemeriksaan BPSB tujuan serta label benih. Pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot dan masa edar benih.
 - b) Tim Supervisi dan Pengawalan bertugas melaksanakan pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan bantuan benih padi dan jagung sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal.
 - c) Tim Pengawalan dan Monitoring, bertugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih padi dan jagung yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.



Gambar 4.3 Binaan kepada petani oleh staff JICA Sumber: badan Hortikultura.



Gambar 4.4 Kunjungan Tim misi Jepang Bersama perwakilan dari Ditjen Hortikultura di Cianjur, salah satu penerima bantuan proyek. Sumber: badan Hortikultura.

2. PINJAMAN DAN ASURANSI PETANI¹¹³

Kendala seperti bencana alam dan serangan hama penyakit dapat merugikan petani, yang bukan hanya akan menciptakan kerusakan tanaman namun juga kemungkinan gagal panen. Dalam hal tersebut diperlukan upaya perlindungan

¹¹³ kementerian pertanian, *Petunjuk Bantuan Benih Tanaman Pertanian*, (Jakarta: kementan, 2016)

petani melalui program asuransi pertanian. Program asuransi pertanian akan berlanjut dengan mencakup komoditas strategis lain dan diselenggarakan di berbagai wilayah kepentingan lainnya, di pusat maupun di daerah yang sangat dibutuhkan untuk menjamin tercapainya program ini dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani.¹¹⁴

Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Hortikultura Indonesia Jepang (IJHOP4) menggunakan teknologi *blockchain* untuk menghubungkan petani dengan pinjaman dan asuransi. Inisiatif pemerintah-ke-pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan petani dan teknik budidaya, mengoptimalkan rantai pasokan lokal, dan memfasilitasi hubungan dengan pasar modern.

Sebagai perbandingan dengan pelaksanaan *pilot project* asuransi pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Indonesia memiliki fitur sebagai berikut:

- dijalankan oleh BUMN, yaitu PT Jasindo (Persero) dan diregulasi oleh Kementerian Pertanian serta melibatkan dinas-dinas pertanian atau dinas terkait lainnya dari Pemerintah Daerah
- ii. Pemerintah memberikan bantuan pembayaran premi sebesar 80% (Rp 144 ribu / hektar) dan petani hanya dimintakan kontribusi premi sebesar 20% (Rp 36 ribu/hektar)
- iii. Penggantian kerugian (klaim) asuransi sebesar Rp 6 juta untuk kerusakan lahan pertanian padi sebesar 75% ke atas.

-

¹¹⁴ Djunedi, "Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: konsep, Tantangan dan Prospek", Jurnal Borneo Administrator ,1, no. 12 (2016).

iv. AUTP bersifat himbauan kepada petani (baik penerima bantuan program pertanian maupun bukan penerima program). Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada petani di Indonesia,

Kebijakan di bidang pembiayaan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan yang ada, antara lain:

- Memanfaatkan skim kredit yang tersedia sebagai sumber permodalan yang berbunga rendah.
- ii. Meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitasi, intermediasi, pendampingan dan pengawalan untuk akses pembiayaan ke lembaga keuangan.
- iii. Mensosialisasikan sumber pembiayaan pertanian yang telah tersedia kepada petani.

Adapun ketentuan untuk asuransi pertanian adalah: 115

- a) Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan seelum musim tanam dimulai.
- b) Presmi asuransi tani adalah 3%. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam.

85

^{115 &}quot;asuransi usaha tani padi", kementerian pertanian, diakses 27 juni 2021, https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1609#

- c) Petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional, sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam.
- d) Dinas pertanian Kabupaten atau Kota membuat daftar peserta asuransi deinitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian Provinsi.
- e) Dinas pertanian Provinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing Kabupaten atau Kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian untuk proses bantuan 80%.
- f) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil singkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanian Kabupaten atau Kota dan Provinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dan perusahaan asuransi.
- g) Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan tanaman atau gagal panen, maka klaim akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- h) Jika intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman. Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kalender sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan.

3. PROMOSI KOMODITAS PANGAN

Daerah yang dijadikan model untuk mendapatkan bantuan promosi pasar dalam program *The Public Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System* adalah Jakarta dan

Provinsi Jawa Barat. Program berjalan di enam daerah, Kabupaten Bogor, Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut dan Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan promosi komoditas pangan hortikultura, dikemas dalam kegiatan pameran buah dan sayur nusantara, berbagai aneka buah langka, aneka buah dan sayur, aneka tanaman, salad bar organik, pojok organik, dan pojok untuk bercocok tanam. Para petani yang terlibat dalam proyek kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan *Japan International Cooperation Agency* tersebut akan membawa dan menjual hasil tanamannya. 116

Sistem dari Implementasi tersebut, Puslitbang Hortikultura bekerjasama dengan unit kerja, unit pelaksana teknis terkait, dan swasta sebagai bentuk perwujudan program Nawacita pemerintah. Ajang promosi diselenggarakan bertujuan untuk mempromosikan inovasi peluang kerjasama dan jejaring bisnis serta mendiseminasikan inovasi pertanian agar dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jejaring bisnis dibuka dalam bentuk temu bisnis variates unggulan sayuran. Terdapat delapan tema yang ditampilkan pada setiap ajang spekta atau pameran hortikultura, yakni: 117

1. *Integrated Farming*. Di tema ini ditampilkan kegiatan antara ternaktanaman sayuran dan integrasi tanaman hortikultura.

https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press171023 ina.pdf

¹¹⁶ "Press Release", JICA, diakses 22 Mei 2021,

¹¹⁷ "Konsep Strategi Promosi Dari Penyelenggaraan Pekta Hortikultura", Iptek Hortikultura, diakses 28 Juni 2021,

https://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/IPTEK/2018/10.%20Nur%20Qomariah%20Spekta.pdf



Gambar 4.5 Kegiatan Farm to Table, sebuah pameran yang diorganisir oleh AEON BSD City Mall dan kementerian pertanian di Mall Atrium AEON Mall BSD City. Sumber: Japan International Cooperation Agency.



Gambar 4.6 Promosi sayuran petani tembus pasar Jepang. Sumber: JICA.

- 2. *Organic Farming*. Semakin tinggi peminat kegiatan budidaya sayuran organic oleh masyarakat akan berdampak pada permintaan produk organik.
- 3. *Presision Farming*. Budidaya tanaman yang dilakukan lebih presisi, seperti beberapa kebutuhan air dan pupuk yang diperlukan untuk masing-masing tanaman

4. *Protected Farming*. Mencari cara untuk membantu petani agar tanaman yang dibudidayakan tetap aman, meski cuaca sulit diprediksi.



Gambar 4.7 Plot percobaan menggunakan naungan hujan di Bandung Barat. Sumber: IJHOP4.

5. *Urban Farming*. Inovasi dalam pemanfaatan lahan perkarangan ataupun lahan yang tidak terpakai sebagai penghasil pangan untuk kebutuhan rumah tangga yang dikemas dalam bentuk Rumah Pangan Lestari.



Gambar 4.8 Penanaman Bawang Daun di Sisi Bedeng Tanaman Cabai di Garut. Sumber: IJHOP4



Gambar 4.9 Pembibitan menggunakan *polybag* dengan pemanfaatan *Urban Farming* di Bandung. Sumber: IJHOP4.

- 6. Modern Farming. Upaya mendorong modernisasi pertanian dengan penggunaan alat mesin pertanian hasil rekayasa Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian (BBPMektan), maka ditampilkan demo alat mesin pertanian untuk budidaya hortikultura.
- 7. Sumber Daya Genetik (SDG) Hortikultura.
- 8. Teknologi dan Produksi Benih.



Gambar 4.10 Penggunaan mesin penyemai manual oleh petani peserta di Garut. Sumber: IJHOP4

F. ANALISIS DATA

Dengan melihat data yang diperoleh oleh peneliti, pandangan peneliti terhadap sektor ketahanan pangan dimulai dari kesinambungan negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luas serta memiliki tanah yang subur untuk memanfaatkannya menjadi sumber pangan. Seharusnya tidak ada alasan untuk kekurangan pangan. permasalahannya bukan terletak pada kekurangan suplai pangan, melainkan karena model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan problem kelaparan. Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Pembuatan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah mulai dari Era Orde Lama hingga Reformasi di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dilihat bahwa kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk meninggalkan pekerjaannya.

Presiden Joko Widodo mengusulkan suatu model kebijakan pangan dimana kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis. Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi

kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di sektor ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani serta penataaan sumber daya manusia. Model kebijakan tersebut relevan dengan aspek-aspek ketahanan pangan yang dituturkan Saragih, yakni 1). Aspek penyediaan jumlah pangan yang memadai, 2). Aspek pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan, 3). Aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan, serta 4). Aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) yakni berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan.

Ketahanan pangan Orde Lama hingga Reformasi dipahami dalam penelitian ini sebagai kemampuan pemerintah untuk memperoleh pangan bagi warganya, sedangkan di Era presiden Joko Widodo peneliti menemukan bahwa ketahanan pangan diartikan sebagai pendistribusian secara tepat waktu untuk mencegah kelaparan dan kekurangan gizi, termasuk dengan menjamin harga yang tepat bagi komunitas yang ditargetkan. Ketahanan pangan adalah keinginan pemerintah untuk mengelola sumberdaya yang terbatas dan untuk menyediakan instrumen bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memperoleh pangan dan bekerjasama dengan negara lain. Artinya di sini, ketahanan pangan tidak lagi peneliti artikan sebagai penyediaan suplai makanan semata, melainkan lebih sebagai persoalan distribusi, pemberian harga yang tepat, dan penyediaan

instrumen bagi berbagai pemangku kepentingan agar bisa bekerjasama sebagai komunitas yang tidak berkekurangan pangan.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan Bilateral dengan Jepang melalui Kementerian Pertanian kerjasama (KEMENTAN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Bagi Indonesia, kerjasama yang dilakukan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 untuk mewujudkan sistem bioindustri pertanian berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan tinggi produk bernilai tambah berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah The Public Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System dengan bertujuan untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Implementasi dari kerjasama tersebut adalah 1). Bantuan benih dan sarana/prasarana, 2) Pinjaman dan asuransi tani, 3) Promosi komoditas pangan dengan berorientasi terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut selaras dengan salah satu dari alasan negara melakukan kerjasama menurut konsep kerjasama internasional yang dibawakan Hostli yaitu demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang di sektor pangan dan implementasinya mencakup studi hubungan internasional. Kerjasama diantara keduanya berfokus pada bidang ekonomi, yakni memajukan ketahanan pangan Indonesia sebagai landasan kerja program. Dilihat dari implementasi

yang ditemukan, pemberian sarana dan prasarana pertanian merupakan salah satu fokus dari kerjasama bilateral antara keduanya di bidang teknologi.

Tujuan hubungan bilateral tersebut bagi Indoneisa sejatinya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam memasarkan produk suatu negara, memperoleh investor serta menjalin persahabatan. Pelatihan petani serta pemasaran komoditas pangan dari program *The Public Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System* dianggap telah tercapai dalam memanfaatkan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Dengan pemanfaatan tersebut, Indonesia berhasil menambah keuntungan negara yang dilihat dari indeks ketahanan pangan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang di sektor pangan memiliki manfaat yang signifikan sesuai konsep kerjasama internasional, yaitu mempererat hubungan antar negara, memasarkan produk dalam negeri (nation branding), serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pelaksanaan implementasi diatur oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pemberiaan bantuan Benih kepada Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), syarat pinjaman dan ketentuan asuransi tani, promosi komoditas pangan. Meskipun adanya intervensi dari JICA, pemerintah Indonesia memiliki hak wewenang mengatur implementasi tersebut berupa kebijakan atau tindakan. Pihak JICA hanya mengimplementasikan Kerjasama tersebut dalam bentuk dana ODA, pembinaan serta *monitoring program*. Dari perilaku kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui Kementerian Pertanian (KEMENTAN) dan *Japan*

International Cooperation Agency (JICA) yang ditemukan datanya oleh peneliti, peneliti menganggap bahwa adanya relevansi dengan konsep yang dibawakan peneliti dalam arti kerjasama internasional menurut Dougherty dan Pflatzgraff, yakni hubungan antar negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri.

Dengan temuan data dan pencocokan peneliti dengan konsep yang ingin dipakai, Peneliti beranggapan bahwa Indonesia telah mencapai ketahanan pangan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan bekerjasama antara Kementerian Pertanian dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) melalui program-programnya. Kerjasama Indonesia dan Jepang melalui Kementerian Pertanian (KEMENTAN) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam ketahanan pangan tahun 2015-2019 yang memiliki Implementasi 1) Bantuan benih, 2). Pinjaman dan asuransi tani, 3) Promosi komuditas pangan. Dari data tersebut peneliti juga mendapat relevansi yang dapat diambil yang pada dasarnya sesuai dengan indikator ketahanan pangan yang dijelaskan oleh Badan Ketahanan Pangan negara Indonesia, yaitu:

1. Ketersediaan Pangan

Bantuan benih serta sarana prasarana dari kerjasama KEMENTAN dan JICA digambarkan suatu Ketersediaan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan didapatkan dari produksi domestik, impor maupun bantuan pangan. Bantuan benih merupakan implementasi dari kerjasama KEMENTAN dan JICA yang berfokus agar petani Indonesia

mendapatkan bantuan pangan untuk diproduksi, dengan benih yang diproduksi nantinya mampu menyebar luas menjadi ketersediaannya pangan masyarakat Indonesia.

2. Akses Pangan

Point kelima, *Urban Farming* dari sub implementasi kerjasama KEMENTAN dan JICA yang ketiga, Promosi komoditas pagan bisa digambarkan sebagai akses pangan. Inovasi dalam pemanfaatan lahan perkarangan ataupun lahan yang tidak terpakai sebagai penghasil pangan untuk kebutuhan rumah tangga yang dikemas dalam bentuk rumah pangan lestari sama persis dengan arti indikator akses pangan yakni semua individu atau rumah tangga dengan kemampuan sumber daya yang ia miliki untuk memperoleh pangan sesuai dengan produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan.

3. Penyerapan Pangan

Penyerapan pangan bisa dilihat dari penggunaan akan pangan, bisa dilihat dari produksi pangan. Dari data yang diperoleh peneliti, indikator pangan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat relevan dan hasil dari implementasi kerjasama Kementan dan JICA berpengaruh pada indeks ketahanan pangan pada tahun 2015-2019.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melaksanakan kebijakan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi misi untuk mewujudkan sistem bioindustri pertanian berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan tinggi produk bernilai tambah berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, Kementerian Pertanian Indonesia (KEMENTAN) melakukan kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency dengan program yang benar-benar mendukung kebijakan Indonesia dalam menggapai visi misi, The Public Private Partnership Project for The Improvement of The Agriculture Product Marketing and Distribution System. Program kerjasama tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah yang dipilih menjadi model. Program tersebut juga guna melakukan pengembangan dan validasi model Produksi dan Distribusi untuk menciptakan sistem pemasaran yang aman dan baik antara petani dan pasar modern. Di sisi lain, proyek ini juga untuk mempromosikan produk holtikultura dan membangun sistem Distribusi yang lebih efisien.

B. SARAN

Dalam proses penelitian sampai penulisan penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih adanya banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis dalam menyampaikan hasil penelitian. Penulis menerima masukan maupun saran yang dapat menyempurnakan penelitian penulis agar penelitian ini bisa lebih baik lagi serta bermanfaaat untuk peneliti selanjutnya dan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, sebai berikut:

- Dalam penelitian topik penelitian selanjutnya, dapat mencari referensi serta tinjauan Pustaka terbaru terkait ketahanan pangan Indonesia di kepemimpinan presiden selanjutnya.
- 2. Terkait narasumber, peneliti selanjutnya bisa lebih diusahakan mendapatkan lebih banyak narasumber dari berbagai instansi naungan Kementan yang berkaitan dengan topik ketahanan pangan Indonesia, baik dari segi produk pertanian, pemasaran pertanian dan pegolahan produk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Armitage, Nicole. From Crisis To Koyto And Beyond: The Evolution Of Environmental Concerns In Japanese Official Development Assistance .Nagoya University, 2010
- Arif, Ahmad. Sagu Papua Untuk Dunia. Jakarta: Gramedia, 2019
- Bachtiar. Menyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, 2019.
- Bogdan dan Biklen, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Moelong et al, 2010.
- Buku Dasawarsa Badan Ketahanan Pangan.
- Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Petunjuk Bantuan Benih Tanaman Pertanian, Kementerian Pertanian
- Dian Effendi, Tonny . *Diplomasi Public Jepang : Perkembangan Dan Tantangan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hanafie. *Perkembangan Ketahanan Pangan Indonesia* .Yogyakarta: LKTSP, 2011.
- Hermanto.Penguatan Kelem<mark>ba</mark>gaan Pangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta, 2008
- Holsti, K.J. *Politik Internasi<mark>on</mark>al Study Analisis II*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Holsti, K.J. International Politics: A Framework for Analysis. Mishawaka, IN, USA, 1995
- JICA. Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion, 2017
- Iryani, Faridai Tri. PerananJapan International Cooperation Agency(JICA)
 Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia (Studi Kasus:
 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan 2007-2010), 2011.
- JICA, Data Collection Survey On Public-Private-Partnership For Activating Agricultural Promotion. Jakarta: JICA, 2017.
- JICA. Data Collection Survey And Agricultural Product Distribution System Of Food Industry In Indonesia. Jakarta: JICA,2013.
- Japan International Cooperation Agency. *Pembangunan Indonesia An Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*, Jakarta: JICA, 2018.
- Kementerian Pertanian RI. *Kinerja Satu Tahun Kementerian Pertanian: Oktober 2014-Oktober 2015*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI Jakarta, 2015.
- Kementrian Koordinator Bidang Per-ekonomian. *Revitalisai Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta, 2005.
- Kartasasmita, Koesnadi . *Organisasi Internasional*. Bandung: Fisip UNPAD Press, 1983
- Komisi Pemilihan Umum. Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian: Visi, Misi Dan Program Aksi Jokowi Dan Jusuf Kalla 2014. 2014.

- Laporan statistic pertanian dari BPS
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya* .Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Mas'oed, Mochtar . *Ekonomi Politik Internasional Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ogoura, Japan's Cultural Diplomacy, The Japan Foundation, 2009. Suryana, Achmad, menelisik ketahanan pangan, kedaulatan pengan, dan swasembada beras, (jurnal, Bogor; 2018).
- Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan yang Berbunyi, "Pemasukan Pangan Dilakukan Apabila Produksi Pangan Dalam Negeri Dan Cadangan Pangan Tidak Mencukupi Konsumsi Dengan Tetap Memperhatikan Kepentingan Produksi Dalam Negeri."
- Petunjuk Bantuan Benih Tanaman Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Prawiro, Radius. *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*. Bandung:PT.Primamedia Pustaka, 2004.
- Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.
- Sawit, M.H. Bulog: pergulatan dalam pemantapan peran dan penyesuaian kelembagaan. Bogor: IPB Press, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Elfabeta, 2007
- Suksmantri, Eko. *Bulog Dalam Bingkai Ketahanan Pangan*. Jakarta: CV.Padma Publisher, 2012.
- Silalahi, Ulbe . metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2012 Suryadi Bakry, Umar . Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

SKRIPSI

- Hirosi, Alfa. Skripsi: "Peran APTERR (Asean Plus Three Emergency Rice Reserves) Dalam Penanganan Ketahanan Pangan Beras Di Indonesia Tahun 2005 2012". Surabaya: UPN Veteran, 2020
- Malifa, Fildza, dan Setiabudi. Skripsi: "Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang Ke Indonesia Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan". Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Nur Insani, Tria. Skripsi: "Kerjasama Indonesia-Thailand Dalam Impor Beras Bagi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional". Bandung: Universitas Pasundan, 2017).
- Tri Regiana, Suciyanti. Skripsi: Implementasi Program Kerjasama Indonesia dan JICA (Japan International Cooperation Agency) Dalam Proyek Mecs (Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use) di Surabaya dan Balikpapan Periode 2011-2013. Surabaya: UPN Veteran, 2014.

JURNAL dan Artikel

- Erani , Yustika, Ahmad. Masalah Ketahanan Pangan. Kompas, Opini, Rabu, 16 Januari, 2008
- Bantacut, Tajuddin. Agenda Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan 2014-2019 (The Agenda of Agricultural Development and Food Security 2014-2019, Jurnal Pangan. Vol.23, No.3 Tahun 2014.
- Bogdan & Biklen, "Penelitian Kualitatif". Jurnal Equlibrium 5, No.9 (2009).
- Dewa, ketut sadra swastika. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan. Jurnal Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, 7. No. 3. (2011)
- Djunedi. Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: konsep, Tantangan dan Dwijdono H.Darwanto, Ketahanan Pangan Berbasis Produksi Dan Kesejahteraan. Jurnal Ilmu Pertanian. Vol 12. No 02. (2005)
- Dougherty, James. E. And Robert L. Pfaltzgraff. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. United States: Published by Pearson. Journal international relations. 7. No. 4. (2000)
- Mujianto, Meiardhy . Peta Ketahanan Kerentanan Pangan 2018. Jurnal Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pangan 2, no. 1.
- Nike, Astria Sinaga. Kerjasama Jepang-Indonesia Melalui *Japan International Association Agaency* (JICA) Di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014. jurnal Jom Fisip, Vol 02, No 01 (2015)
- Prospek. Jurnal Borneo Administrator 12. Vol. 1(2016).
- Simatupang. Indonesian rice production: polices and realities, jurnal studi ekonomi.vol.1 (2008)
- Santosa, Dwi Andreas. *krisis pangan dan kebangkitan petani*. kompas, 13 juni 2014
- Webb, Patrik dan Rogers, Beatrice. Addressing The In Food Insecurity, Occasional. Jurnal AID Office Of Food For Peace. No. 1, US.
- Yusron, Avivi. Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Jurnal pembangunan. Vol. 3 No. 1 (2020).
- Yunastiti Purwaningsih. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 9, No 1 (2008)

MEDIA ONLINE

ahmad arif. "masalah kemerdekaan pangan, dari era soekarno hingga joko widodo". diakses 20 mei 2021, https://alif.id/read/bandung-mawardi/masalah-kemerdekaan-pangan-dari-era-soekarno-hingga-joko-widodo-b232046p/

andryanto. "mengurangi pasang surut ekonomi di zaman soeharto". Diakses 20 mei 2021. https://indonesiainside.id/narasi/2019/06/08/mengurai-pasang-surut-ekonomi-di-zaman-soeharto

agriculture transformation & food security 2040". diakses 22 mei 202. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12145561.pdf

badan ketahanan pangan penguatan ketersediaan pangan". diakses 21 Mei 2021. http://bkp.pertanian.go.id

badan ketahanan pangan. satu dasawarsa kelembagaan ketahanan pangan".diakses 21 mei 2021.

http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Buku_Dasawarsa_BKP.pdf.

badan litbang lahan pertanian ."Indonesia peringkat mumpuni". diakses 21 mei 2021. https://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/layanan-mainmenu-65/info-terkini/656-pertanian-indonesia-masuk-peringkat-25-besar-dunia1

EIU. "Indonesia; pangan perspektif global". diakes 21 mei 2021. https://foodsustainability.eiu.com/country-ranking/

Kemdikbud. Letak Dan Luas Wilayah Indonesia". diakses 23 September 2020, https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/sumberbelajar/tampil/Letak-dan-Luas-Indonesia--2017/menu4.html

oxfod dictionary. The definition of implementation". diakses 15 Oktober 2020. https://www.oxfordlearnersdictionary.com/definition/english/implementation?q=implementation.

kendar umi kulsum. Ketahanan Pangan: sejarah, perkembangan konsep dan ukuran". diakses 23 mei 2021, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparantopik/ketahanan-pangan-sejarah-perkembangan-konsep-dan-ukuran

leo Kusuma . sejarah kebijakan pangan di Indonesia: tinjauan". diakses 20 mei 2021, http://leo4kusuma.blogspot.com/2013/03/sejarah-kebijakan-pangan-di-indonesia.html#.YLOJzy9gllA

HIMATETA IPB. "pertanian modern:revolusi hijau". diakses 20 mei 2021.https://himateta.lk.ipb.ac.id/2010/07/pertanian-modern-revolusi-hijau/

sejarah pertanian indonesia".diakses 21 mei 2021. http://bkp.pertanian.go.id/sejarah

kementerian pertanian. esensi kebijakan pangan era amran: menyayangi petani".diakses 21 mei

2021.https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219.

Muhammad mufid martami. "kebijakan ketahanan pangan jokowi".Diakses 21 mei

2021.https://www.kompasiana.com/kanopi_feui/55e98d9f8e7e61b90ab31707/kebijakan-pangan-jokowi-jalan-menuju-ketahanan-pangan-indonesia

lusia arumingtyas . "Presiden serahkan 3 juta hektar untuk rakyat". diakses 21 mei 2021. https://www.mongabay.co.id/2021/01/07/presiden-serahkan-3-jutaan-hektar-lahan-untuk-rakyat-jawab-persoalan-agraria/

indeks ketahanan pangan indonesia, BKP. diakses 21 mei 2021. http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/12038/Indeks%20K etahanan%20Pangan%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

muchtar . membangun mitra dagang Indonesia-jepang". diakes 25 mei 2021. http://www.antara.co.id/arc2007/7/3/pertemuan-tiap-finalisasi-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-tokyo-jepang-21

"Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies" .diakses 21 mei 2021. https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/press en/2007/11/7079/01.pdf

HUMAS KLHK . 25 tahun Kerjasama Indonesia-jepang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" . diakses 22 mei 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/985

CEIC data . jepang kunjungan wisatawan". diakses 22 mei 2021. https://www.ceicdata.com/id/indicator/japan/visitor-arrivals.

"Signing of Japanese ODA Loan Agreements with Indonesia: Supporting food security and the promotion of the tourism industry". diakses 22 mei 2021. https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/170330 03.html

JICA."press release:. diakses 22 mei 2021. https://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/c8h0vm000001pwe4-att/press171023 ina.pdf

kementerian pertanian . "asuransi usaha tani padi". diakses 27 juni 2021. https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1609#

Iptek hortikultura. "konsep strategi promosi dari penyelenggaraan pekta hortikultura". diakses 28 juni 2021, https://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/IPTEK/2018/10.%20Nur%20Qomariah%20Spekta.pdf